

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BADUNG
MENURUT LAPANGAN USAHA
2012-2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BADUNG**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BADUNG
MENURUT LAPANGAN USAHA
2012-2016**

<http://badungkab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BADUNG MENURUT LAPANGAN USAHA
2012 - 2016**

ISSN : 2087-6866

No. Publikasi : 51030.1701

Katalog : 9302008.5103

Ukuran Buku : 14,8 cm X 21 cm

Jumlah Halaman : xvi + 166 halaman

Naskah :

BPS Kabupaten Badung

Penyunting:

BPS Kabupaten Badung

Gambar Kover :

BPS Kabupaten Badung

Ilustrasi Kover :

Objek wisata Garuda Wisnu Kencana Bali

Diterbitkan oleh :

©BPS Kabupaten Badung

Dicetak oleh :

CV. Bhineka Karya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan tujuan komersil tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung
Menurut Lapangan Usaha 2012-2016**

Penanggung Jawab Umum :

Ir. Dewa Made Suambara, MMA

Editor :

Ir. Dewa Made Suambara, MMA

Penulis :

I Wayan Putrawan, SST., M.Si

Disain :

I Gusti Bagus Adi Sudiarsana, S.Si

<http://badungkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung Tahun 2012-2016 adalah publikasi yang disusun oleh seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Badung. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah PDRB menurut Lapangan Usaha dari tahun 2012-2016 disertai dengan ruang lingkup dan sumber data yang digunakan pada masing-masing lapangan usaha.

Publikasi ini memuat tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Badung yang disajikan dalam analisis deskriptif, grafik dan tabel-tabel. Penyajian publikasi ini dilihat dari dua sisi, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 dalam bentuk nominal dan persentase untuk distribusi maupun pertumbuhannya.

Perlu diketahui bahwa dalam penerbitan tahun 2016 ini, penyajian data PDRB telah menggunakan Tahun Dasar 2010=100. Pengimplementasian *System of National Accounts* (SNA) 2008 menurut lapangan usaha sebagaimana rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah diterapkan.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang membutuhkannya. Kritik dan saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan publikasi sejenis di masa yang akan datang.

Mangupura, 10 Agustus 2017
Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung
Kepala,

Ir. Dewa Made Suambara, MMA

<http://badungkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PENJELASAN TEKNIS	xiii
BAB I PENJELASAN UMUM	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	3
1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	5
1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	6
1.4 Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Badung	13
BAB II RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	19
2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21
2.2 Pertambangan dan Penggalan	30
2.3 Industri Pengolahan	34
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas	44
2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	48
2.6 Konstruksi	49
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	52
2.8 Transportasi dan Pergudangan	55
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61
2.10 Informasi dan Komunikasi	64
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi	67
2.12 Real Estat	79
2.13 Jasa Perusahaan	81

2.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	84
2.15	Jasa Pendidikan	85
2.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86
2.17	Jasa Lainnya	87
BAB III	TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN BADUNG	93
3.1	Struktur Ekonomi	95
3.2	Pertumbuhan Ekonomi	106
3.3	PDRB Per Kapita	115
BAB IV	PERTUMBUHAN DAN PERANAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	119
4.1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	121
4.2	Pertambangan dan Penggalan	125
4.3	Industri Pengolahan	127
4.4	Pengadaan Listrik dan Gas	130
4.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	131
4.6	Konstruksi	133
4.7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	134
4.8	Transportasi dan Pergudangan	136
4.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	138
4.10	Informasi dan Komunikasi	141
4.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	142
4.12	Real Estate	144
4.13	Jasa Perusahaan	145
4.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	146
4.15	Jasa Pendidikan	147
4.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	148
4.17	Jasa Lainnya	149
BAB V	PENUTUP	151
LAMPIRAN	155

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	11
TABEL 1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	12
TABEL 1.3	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	13
TABEL 3.1	Struktur PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha , 2012–2016 (Persen)	105
TABEL 3.2	Laju dan Rata-rata Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha, 2012 – 2016	112
TABEL 3.3	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha, 2012 – 2016 (persen)	115
TABEL 3.4	Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Badung, 2012 – 2016.....	118
TABEL 4.1	Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (Persen)	123
TABEL 4.2	Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (Persen).....	125

TABEL 4.3	Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (Persen)	128
TABEL 4.4	Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (Persen).....	131
TABEL 4.5	Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (Persen)	135
TABEL 4.6	Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (Persen)	137
TABEL 4.7	Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (Persen)	139
TABEL 4.8	Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (Persen).....	143



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Pariwisata dan Industri Manufaktur Terhadap PDRB di Kabupaten Badung, 2012 - 2016	16
GAMBAR 3.1	Kontribusi Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Badung 2012 – 2016 (Persen)	99
GAMBAR 3.2	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian dan Lapangan Usaha Akomodasi Makan Minum Terhadap PDRB Kabupaten Badung 2012 – 2016 (Persen)	101
GAMBAR 3.3	Distribusi PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha 2016 (Persen)	103
GAMBAR 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung dan Perbandingannya dengan Provinsi Bali dan Nasional 2012 – 2016 (Persen)	108
GAMBAR 3.5	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha 2016 (Persen).....	109
GAMBAR 3.6	Rata-rata Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2016 (Persen)	111
GAMBAR 3.7	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha, 2016 (Persen).....	113

GAMBAR 3.8	PDRB Per Kapita Kabupaten Badung, 2012-2016 (juta rupiah)	117
GAMBAR 4.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung dan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan, 2012 – 2016 (Persen).....	126
GAMBAR 4.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan 2016 (Persen)	129
GAMBAR 4.3	Laju Pertumbuhan PDRB Badung dan Lapangan Usaha Konstruksi 2012 – 2016 (Persen)	134
GAMBAR 4.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung dan Laju Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2012 – 2016 (Persen).....	140
GAMBAR 4.5	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi 2012 – 2016 (persen)	142
GAMBAR 4.6	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estate 2012 – 2016 (persen)	145

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (juta rupiah)	157
Lampiran 1.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (juta rupiah)	158
Lampiran 2.1	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen).....	159
Lampiran 2.2	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)	160
Lampiran 3.1	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016	161
Lampiran 3.2	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2016	162
Lampiran 4.1	Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016	163
Lampiran 4.2	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen).....	164

Lampiran 5.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)	165
Lampiran 5.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)	166

<http://badungkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
6. **Output** adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh lapangan usaha dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu wilayah (negara, provinsi, dan sebagainya) dalam suatu periode waktu tertentu (umumnya satu tahun), tanpa memperhatikan asal-usul pelaku produksinya.
7. **Upah/gaji** adalah nilai tambah yang dibayarkan sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi tenaga kerja (termasuk di dalamnya imputasi upah dan gaji)



Bab I
PENJELASAN DAN GAMBARAN
UMUM

<http://badungkab.bps.go.id>

<http://badungkab.bps.go.id>

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pentingnya suatu perencanaan yang baik dalam melakukan suatu kegiatan sangatlah disadari oleh banyak pihak, namun terkadang tidak semua pihak dapat melakukan hal itu. Perencanaan yang baik juga sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting karena dengan perencanaan pembangunan akan terlihat akan menuju kemana pembangunan tersebut bermuara. Jadi perencanaan pembangunan bisa dikatakan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Beberapa manfaat pembangunan ekonomi bagi suatu wilayah adalah mengurangi pengangguran, dimana dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Selain itu pembangunan ekonomi pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dengan luasnya lapangan kerja bagi masyarakatnya, maka akan tercipta penambahan pendapatan sehingga kesejahteraan akan terwujud. Peningkatan pendapatan tentunya diharapkan tidak dinikmati oleh segelintir pihak saja, dengan adanya pembangunan ekonomi yang baik, selain meningkatkan

pendapatan, peningkatan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan kata lain telah terjadi pemerataan pendapatan. Sehingga perencanaan yang matang dan baik sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan yang baik tentunya harus berdasar pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di daerah diantaranya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa

memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- a) PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

- c) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
- e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3. Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Berbagai perubahan telah banyak terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dalam kisaran sepuluh tahun (dekade). Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik regional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDRB Kabupaten/Kota dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan penerapan rekomendasi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) yang dalam transformasinya digunakan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDRB kabupaten dilakukan secara bersama-sama dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan PDB nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan antar tingkatan wilayah.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

Kerangka SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

Kerangka SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan mengubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian tahun 2010 dinilai relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi.

¹ SNA1993, para 16.76: “constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing”

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi pada SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 di antaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* pada *Cultivated Biological Resources (CBR)*:**

Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum dipanen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- **Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)***
- **Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).**

Merupakan harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- **Klasifikasi :**

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *Internasional Standard Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC)*

rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010). Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

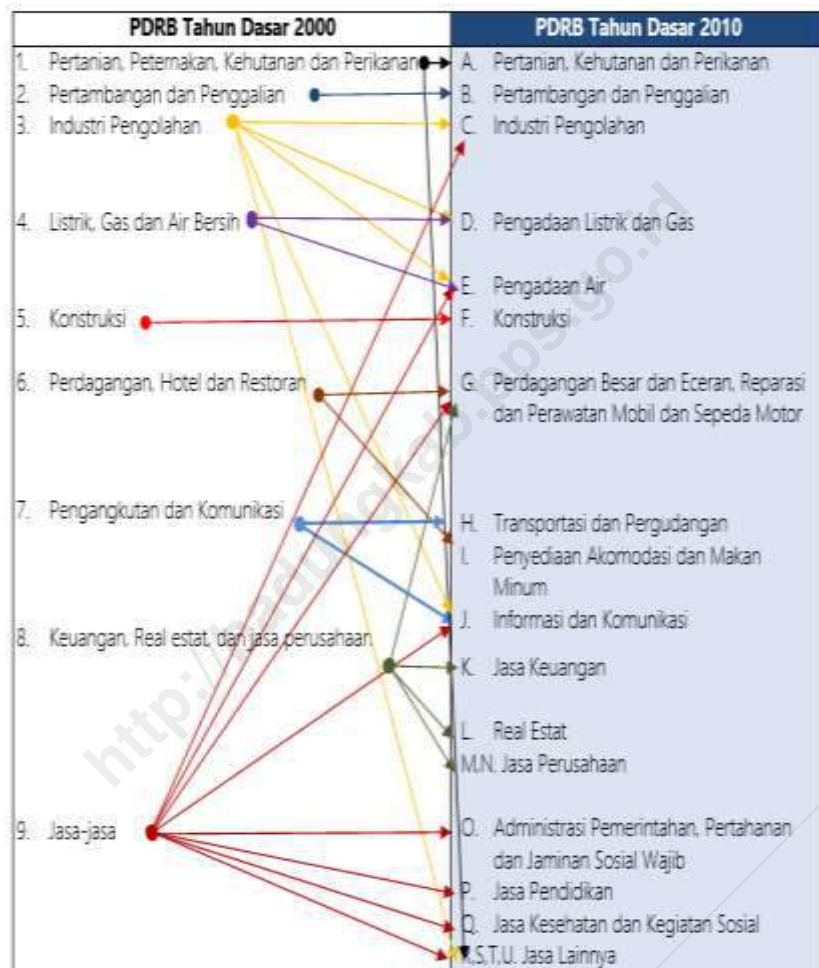
Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC) .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010

(2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

Tabel 1.3.
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

1.4. Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Badung

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten penyumbang kue ekonomi terbesar di Provinsi Bali. Tanpa mengecilkkan arti dari kabupaten yang lainnya, Kabupaten Badung mampu berperan hampir seperempat dari keseluruhan ekonomi yang dihasilkan di Provinsi Bali. Kontribusi tersebut cukup dominan dalam perekonomian Bali. Bali sebagai salah satu objek wisata dunia, memang memiliki daya tarik yang sangat besar bagi kunjungan para wisatawan. Badung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki potensi wisata cukup besar, baik potensi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata remaja maupun penunjang pariwisata seperti penyediaan akomodasi dan makan

minum. Setidaknya terdapat 36 objek wisata yang ada di Kabupaten Badung, diantaranya adalah wisata pantai, pura, Garuda Wisnu Kencana (GWK), monumen tragedi kemanusiaan di Kuta dan lain sebagainya.

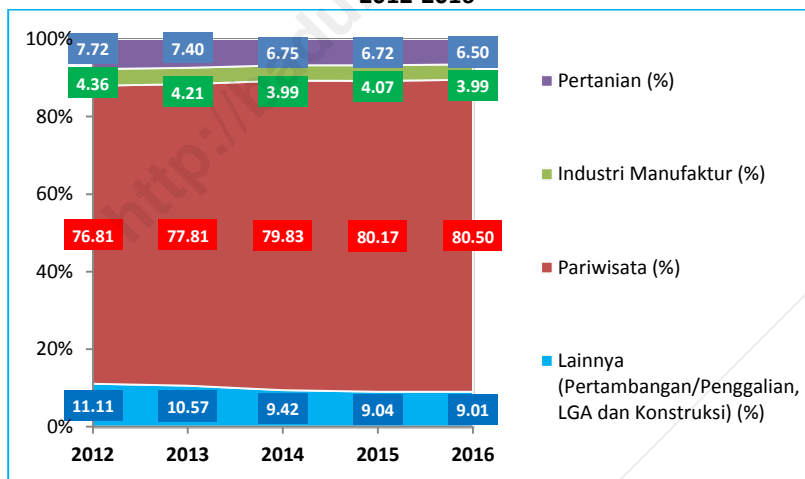
Kontribusi lapangan usaha pariwisata atau jasa atau yang sering disebut sektor tersier (gabungan dari lapangan usaha jasa-jasa) terhadap PDRB Kabupaten Badung pada tahun 2016 sebesar 80,50 persen. Kontribusi ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2012 kontribusi lapangan usaha pariwisata terhadap besaran PDRB Badung telah mencapai 76,81 persen. Selain karena banyaknya objek wisata dan penyediaan akomodasi dan makan minum (restoran) yang ada di Kabupaten Badung, kunjungan wisatawan yang setiap tahun mengalami peningkatan juga berimbas pada meningkatnya nilai tambah pada lapangan usaha transportasi khususnya transportasi udara. Bandara Ngurah Rai masih satu-satunya bandara internasional yang ada di Provinsi Bali yang letaknya berada di Kecamatan Kuta. Kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2015 lebih 6,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,93 juta orang, meningkat sebesar 23,25 persen dari tahun 2015 yang sebanyak 4 juta orang kunjungan.

Kontribusi lapangan usaha pertanian terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan lapangan usaha pariwisata. Bukan saja kecil, tetapi peranannya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Walaupun secara besaran nominal maupun atas dasar harga konstan, lapangan usaha pertanian ini meningkat setiap tahunnya, tetapi peranannya atau kontribusinya belum mampu untuk menyaingi kecepatan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pariwisata. Selain itu, berkurangnya lahan sebagai akibat dari adanya alih fungsi lahan yang semakin marak dan berkurangnya minat generasi muda untuk bertani juga menyebabkan kontribusi lapangan usaha ini semakin menurun. Usaha-usaha ekstra masih sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lapangan usaha ini, karena bagaimanapun juga, sektor ini memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan sektor pariwisata.

Berbagai langkah upaya telah dilakukan khususnya oleh pemerintah daerah setempat untuk lebih mamacu laju perekonomian sektor pertanian. Terlihat dari nilai PDRB sektor ini dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun konstan selalu mengalami peningkatan. Hanya saja, nilai tambah yang dihasilkan memang belum mampu untuk menyaingi laju pergerakan dari sektor tersier yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Pertanian secara rata-rata menyumbang sekitar 7 persen dalam beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2012 kontribusi kategori ini mencapai 7,72 persen, lalu menurun menjadi 7,40 persen, 6,75

persen, 6,72 persen pada tahun 2013, 2014, 2015, dan pada tahun 2016 mencapai sebesar 6,50 persen. Sementara itu, lapangan usaha industri manufaktur di Kabupaten Badung memiliki peran secara rata-rata sebesar 4 persen dari total perekonomian Kabupaten Badung. Pada tahun 2012 kontribusi lapangan usaha ini mencapai 4,36 persen, menurun menjadi 4,21 persen tahun 2013 dan pada tahun 2014 mencapai 3,99 persen, pada tahun 2015 meningkat menjadi 4,07 persen, kembali turun menjadi 3,99 persen pada tahun 2016. Gambar 1.1 menunjukkan peran lapangan usaha pertanian, pariwisata dan industri manufaktur serta lainnya (pertambangan/penggalian, LGA dan konstruksi) terhadap PDRB Kabupaten Badung.

Gambar 1.1
Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Pariwisata, Industri Manufaktur dan Lainnya Terhadap PDRB Kabupaten Badung, 2012-2016



Sumber: BPS Kabupaten Badung (2016)

Pertumbuhan ekonomi Badung sempat mengalami perlambatan pada tahun 2015 yaitu tumbuh sebesar 6,27 persen, lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun 2014 yang sebesar 6,98 persen. Percepatan pertumbuhan Badung kembali terjadi pada tahun 2016 ini yang mampu tumbuh sebesar 6,79 persen walaupun tidak setinggi pertumbuhan pada tahun 2014. Situasi perekonomian global dan nasional yang memang mengalami perbaikan-perbaikan memberikan pengaruh pada perbaikan situasi perekonomian regional termasuk di Kabupaten Badung. Perbaikan situasi perekonomian global dan nasional dapat tercermin dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pada tahun 2016 yang mencapai 4,93 juta orang dan tahun 2015 lebih dari 4 juta orang. Hal ini mengindikasikan dampak dari adanya perbaikan ekonomi di masing-masing negara tersebut, baik itu Amerika Serikat, maupun Tiongkok yang termasuk dalam salah satu pemasok wisatawan mancanegara yang cukup besar ke Bali. Sementara itu, pada tingkat nasional juga telah mengalami perbaikan-perbaikan dari terjadinya bencana alam di Nusa Tenggara Barat yaitu meletusnya Gunung Raung dan Gunung Batujari pada tahun sebelumnya yang mengakibatkan ditutupnya Bandara Ngurah Rai saat itu, yang pada tahun 2016 dapat dikatakan tidak terjadi sehingga terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2016.

<http://badungkab.bps.go.id>



Bab II
RUANG LINGKUP
DAN METODE PENGHITUNGAN

<http://badungkab.bps.go.id>

<http://badungkab.bps.go.id>

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya

(sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Seksi Statistik Produksi BPS.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya

dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa

sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Badung. Data harga berupa

harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Seksi Statistik Produksi BPS.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicapuk juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari *furskin*, reptil, dan kulit

unggass hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis

kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung, dan Seksi Statistik Produksi BPS. Data harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Seksi Statistik Produksi BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang

diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Badung. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Seksi Statistik Produksi BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup

output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapannya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Kabupaten Badung tidak menghasilkan pertambangan minyak, gas dan panas bumi, sehingga nilai tambah untuk kategori ini juga nol. Tetapi untuk level nasional, data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan

kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Kabupaten Badung tidak menghasilkan pertambangan batubara dan lignit, sehingga nilai tambah untuk kategori ini juga nol. Tetapi untuk level nasional, data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas - BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi /Kabupaten/Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak

mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian didapatkan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan,

pertambahan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri Minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12.

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian

tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15.

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekam. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan

kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar,

penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24.

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya. yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan

industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28.

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Kabupaten Badung tidak menghasilkan nilai tambah pada industri batubara dan pengilangan. Tetapi untuk level nasional, sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri-BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi-BPS, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran - BPS, sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga-BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas-BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS. Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK - BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

Kabupaten Badung tidak menghasilkan nilai tambah pada industri pengolahan migas. Tetapi untuk level nasional, pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB

atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan. Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan

dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada

masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, Baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT. PLN setiap triwulan dan juga statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistim distribusi gas

yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/ minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Nilai tambah di kategori ini di Kabupaten Badung hanya menghasilkan dari produksi es, sedangkan gas tidak ada. Untuk level nasional, sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan

keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga

berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data Produksi adalah BPS - Seksi Statistik Produksi, APBD (Kemenkeu); data Output Sampah diperoleh dari Seksi Statistik Produksi - BPS; Data Harga diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi - BPS; Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih – BPS.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu

unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi

dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor-BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor-BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Bidang Distribusi BPS Provinsi. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses,

penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas

usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-*deflate* menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik), Statistik Transportasi (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Kabupaten Badung tidak mempunyai nilai tambah pada angkutan rel. Pada level wilayah yang mempunyai nilai tambah ini, metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang

diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter/sewa* kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Seksi Statistik Distribusi, BPS.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Kabupaten Badung tidak mempunyai nilai tambah pada subkategori angkutan laut, dan untuk level nasional, indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator

harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Kabupaten Badung tidak mempunyai nilai tambah pada subkategori ASDP ini, sedangkan untuk level nasional, data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode

ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*.

Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhandha Ghara Reksha, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 - BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi - BPS.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan

gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Seksi Statistik Produksi, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Pembinaan Kesenian dan perfilman, Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan

telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Seksi Statistik Distribusi-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Seksi Statistik Distribusi-BPS.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti:

mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi

dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak bertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak bertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga

berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi, BPS.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Seksi Statistik

Distribusi BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum

digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan

keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Keegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa

informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Pada level nasional, sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Pada level nasional, sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian,

perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Pada tataran nasional, output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data pada level nasional berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali

amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data pada level nasional, berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS.

Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Seksi Statistik Distribusi BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta

penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan,

persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Seksi Statistik Sosial BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi BPS.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), BPS; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga

konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS; Seksi Statistik Distribusi BPS.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010

menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Dinas Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS; Seksi Statistik Distribusi.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/ indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Statistik Kependudukan, Susenas, and Seksi Statistik Distribusi).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari

perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Seksi Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih) BPS Provinsi, dan Survei Khusus yang dilakukan oleh Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk *The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Health Organization (WHO), the Organization for Economic*

Co-operation and Development (OECD), The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum. Sumber data pada tataran nasional diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

<http://badungkab.bps.go.id>



Bab III
TINJAUAN EKONOMI
KABUPATEN BADUNG

<http://badungkab.bps.go.id>

<http://badungkab.bps.go.id>

3.1 STRUKTUR EKONOMI

Potensi sumber daya lokal berupa kekhasan daerah merupakan hal strategis yang dibutuhkan sebagai landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Identifikasi lapangan usaha ekonomi potensial menjadi kebutuhan bagi optimalisasi proses dan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu alat indikator yang dapat dipakai untuk mengukur potensi ekonomi suatu wilayah adalah dengan mengetahui struktur perekonomian wilayah tersebut. Potensi tersebut dapat dikatakan sebagai basis ekonomi wilayah tersebut. Basis dilihat dari sisi potensi ekonomi adalah lapangan usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif yang cukup tinggi, sehingga mampu mengeksport barang dan jasa ke luar daerah. Sedangkan batasan nonbasis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut, dimana lapangan usaha nonbasis ini berfungsi sebagai penunjang sektor basis.

Basis ekonomi di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis, dalam arti pada tahun tertentu mungkin saja lapangan usaha basis tersebut bisa beralih ke lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha basis bisa mengalami kemajuan atau kemunduran. Penyebab kemajuan lapangan usaha basis adalah perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi, perkembangan pendapatan

dan penerimaan daerah, perkembangan teknologi, dan adanya perkembangan prasarana ekonomi dan sosial, sedangkan kemunduran lapangan ekonomi basis bisa berupa perubahan permintaan dari luar daerah dan kehabisan cadangan sumber daya.

Perubahan struktur ekonomi atau sering disebut dengan transformasi struktural merupakan suatu rangkaian perubahan yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam komposisi dari permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti penggunaan tenaga kerja dan modal) yang disebabkan adanya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara teori, perekonomian suatu daerah dalam jangka panjang akan terjadi perubahan struktur perekonomian dimana semula mengandalkan lapangan usaha pertanian menuju lapangan usaha industri. Dari sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari lapangan usaha pertanian ke lapangan usaha industri. Selanjutnya dari lapangan usaha industri menuju lapangan usaha jasa-jasa. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana struktur perekonomian Kabupaten Badung yang dilihat dari sudut pandang PDRBnya.

3.1.1 Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2012-2016

Lapangan usaha tersier dapat dikatakan mendominasi perekonomian Kabupaten Badung bila dilihat secara umum,

dibandingkan dengan lapangan usaha primer dan sekunder. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat bagian nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh komponen ekonomi yang bergerak di Kabupaten Badung berada pada lapangan usaha tersier. Lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha informasi dan komunikasi, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha real estate, lapangan usaha jasa perusahaan, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, lapangan usaha jasa pendidikan, lapangan usaha kesehatan dan kegiatan sosial, serta lapangan usaha jasa lainnya.

Perkembangan lapangan usaha sektor tersier ini dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu periode 2012-2016 secara umum menunjukkan arah peningkatan. Sektor tersier ini selalu mendominasi perekonomian di Kabupaten Badung. Pada tahun 2012 sektor ini mampu menghasilkan 76,81 persen dari keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan, sedikit menurun dari kontribusi tahun 2011 yang sebesar 77,21 persen, dan pada tahun-tahun selanjutnya mengalami tren yang meningkat dan menjadi sebesar 80,50 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2012 sektor tersier mengalami penurunan kontribusi oleh karena pada tahun tersebut dimulainya mega proyek pembangunan, baik jalan tol di atas perairan,

perluasan bandara Ngurah Rai, pembuatan jalan lintas bawah patung Dewa Ruci, yang termasuk dalam kategori konstruksi sehingga tercakup dalam sektor sekunder. Dengan demikian pada tahun tersebut terjadi pertumbuhan yang cepat pada lapangan usaha konstruksi dan pemenuhan tenaga kerja pada sektor sekunder ini, sehingga nilai tambah di sektor sekunder bertambah, dan terjadi penurunan pada sektor tersier.

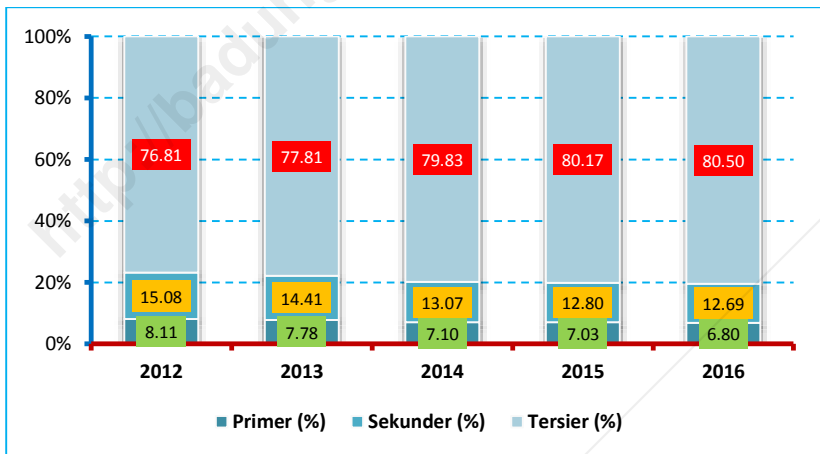
Jika pada sektor tersier perkembangan kontribusinya pada periode tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami kecenderungan meningkat, lain halnya dengan sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta lapangan usaha konstruksi. Sektor sekunder pada periode 2012-2016 mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2012 peranan sektor sekunder mencapai 15,08 persen, kemudian menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar 14,41 persen, kembali menurun pada tahun 2014 dengan kontribusi sebesar 13,07 persen. Kontribusi sektor sekunder pada tahun 2015 sebesar 12,80 persen, namun sedikit menurun pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 12,69 persen.

Demikian pula halnya dengan sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kecenderungan kontribusi yang terus menurun. Pada tahun 2012 peranan sektor

primer mencapai 8,11 persen, terus mengalami penurunan hingga mencapai 6,80 persen pada tahun 2016.

Uraian tersebut diatas dapat menggambarkan bahwa memang terjadi transformasi struktural di Kabupaten Badung, dimana terjadi penurunan kontribusi sektor primer dan peningkatan kontribusi pada sektor nonprimer. Teori ekonomi menunjukkan bahwa transformasi ekonomi struktural terlihat dari terjadinya pergeseran kontribusi sektor primer yang menurun seiring bertambahnya kontribusinya sektor sekunder, baru kemudian beranjak ke sektor tersier. Pada situasi Badung, terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor teriser tanpa melalui pergeseran ke sektor sekunder.

Gambar 3.1.
Kontribusi Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier
Dalam PDRB Kabupaten Badung 2012-2016



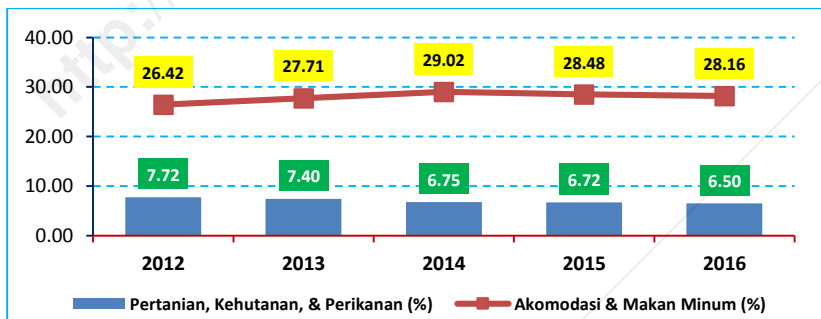
Sumber : BPS Kabupaten Badung (diolah)

Struktur perekonomian Kabupaten Badung selama periode tahun 2012 – 2016, jika dijabarkan secara lebih rinci tidak banyak mengalami perubahan. Kontribusi lapangan usaha terbesar tetap disumbangkan oleh lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum. Lapangan usaha akomodasi dan makan minum selama tahun 2012-2016 sumbangannya mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012 sumbangan lapangan usaha ini mencapai 26,42 persen dari keseluruhan nilai tambah di Kabupaten Badung, meningkat terus sampai tahun 2014 mencapai 29,02 persen, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan hingga menjadi sebesar 28,48 persen dan kembali turun pada 2016 menjadi 28,16 persen. Perkembangan lapangan usaha akomodasi dan makan minum sebagai salah satu penunjang pariwisata tidak terlepas dengan adanya pengaruh dari asal wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali yang beragam, misalnya Tiongkok sebagai penyumbang wisman terbanyak selain Australia mengalami perlambatan ekonomi di negaranya pada 2015. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat yang semula mencapai 7,3 persen menjadi 6,90 persen tahun 2015 dan 6,7 persen pada tahun 2016. Selain itu rata-rata menginap baik tamu asing maupun domestik di hotel berbintang khususnya pada beberapa tahun terakhir juga berpengaruh pada sektor ini.

Berbeda dengan lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan

perikanan mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 kontribusi pertanian mencapai 7,72 persen dan pada tahun 2016 kontribusinya turun menjadi 6,50 persen. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Alih fungsi ini berpengaruh pada menurunnya luas panen tanaman pangan di Kabupaten Badung. Menurut data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung pada tahun 2015 saja terjadi alih fungsi lahan seluas 40 hektar. Alih fungsi lahan tersebut paling banyak terjadi di Kecamatan Kuta Utara yaitu seluas 17 hektar. Kuta Utara yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kuta mengalami perkembangan pesat, toko, villa, cafe banyak bermunculan di daerah ini. Lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian atau perkebunan berubah fungsi menjadi bangunan.

Gambar 3.2.
Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian dan Lapangan Usaha Akomodasi Makan Minum Terhadap PDRB Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (Persen)



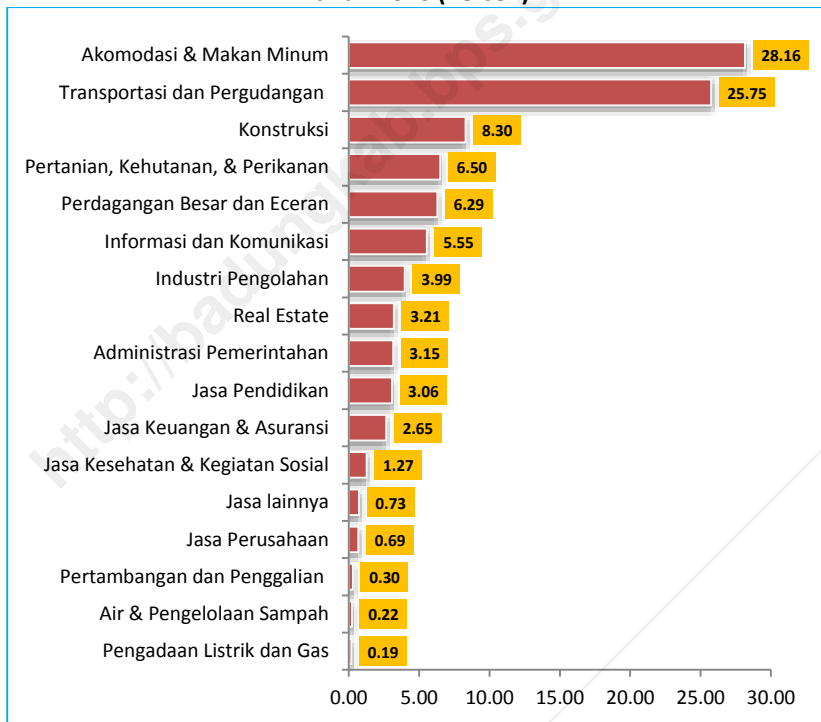
Sumber : BPS Kabupaten Badung (diolah)

Lapangan usaha pertanian sebagai penyokong penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Badung telah dimengerti khususnya oleh pemerintah daerah setempat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari lapangan usaha pertanian ini. Mulai dari pemberdayaan masyarakat petani, pemberian bantuan baik dana, bibit, dan alat-alat pertanian kepada petani, bahkan pemerintah daerah setempat telah melaksanakan festival pertanian yang digelar setiap tahun di wilayah Badung Utara tepatnya di Desa Plaga. Festival ini bertujuan untuk memperluas jaringan para petani sehingga lebih banyak investor yang mau menanamkan modalnya di bidang pertanian. Selain itu festival ini juga bertujuan untuk mengembangkan wilayah Badung Utara dan mensinergikan acara tersebut dengan pariwisata di daerah ini. Pengembangan agrowisata juga telah dilakukan. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan nilai tambah pada lapangan usaha pertanian, hanya saja kontribusi lapangan usaha ini belum mampu untuk menyaingi kecepatan peningkatan nilai tambah di lapangan usaha lainnya khususnya akomodasi dan penyediaan makan minum serta lapangan usaha transportasi.

Lapangan usaha transportasi merupakan lapangan usaha penyumbang terbesar kedua setelah lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum. Lapangan usaha ini pada tahun 2016 menyumbang sebesar 25,75 persen dari keseluruhan nilai tambah yang mampu dihasilkan di Kabupaten Badung. Alasannya bahwa

bandara Ngurah Rai merupakan satu-satunya bandara internasional di Bali yang terletak di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Aktivitas kebandarudaraan meliputi pemberangkatan baik penumpang maupun barang, begitupula sebaliknya kedatangan penumpang dan barang. Bandara Ngurah Rai merupakan bandara terbaik dunia berdasarkan hasil survei Airport Council International (ACI), sehingga tak heran jika nilai tambah yang dihasilkan dari angkutan udara cukup besar.

Gambar 3.3.
Distribusi PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Badung (diolah)

Kedua lapangan usaha diatas, yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta lapangan usaha transportasi saja telah menyumbangkan lebih dari separuh nilai tambah keseluruhan, sehingga kontribusi lapangan usaha lainnya terlihat cukup kecil, yaitu dibawah 10 persen. Seperti misalnya lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor, serta lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mencapai hanya tidak kurang dari 5 persen. Masing-masing lapangan usaha tersebut menyumbang sebesar 8,30 persen untuk konstruksi, 6,29 persen untuk perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, dan 5,55 persen untuk lapangan usaha infokom pada tahun 2016.

Posisi selanjutnya diisi oleh lapangan usaha industri pengolahan yang mampu memberikan kontribusi sebesar 3,99 persen, diikuti oleh lapangan usaha real estate, administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan yang mampu berkontribusi diatas 3,21 persen pada tahun 2016. Sedangkan untuk lapangan usaha jasa keuangan mampu memberikan andil sebesar 2,65 persen, lapangan usaha jasa kesehatan sebesar 1,27 persen, lapangan usaha jasa lainnya 0,73 persen, lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 0,69 persen, serta lapangan usaha penggalian, air dan listrik masing-masing menyumbang sebesar 0,71 persen.

Selengkapnya struktur PDRB Kabupaten Badung tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Struktur PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha,
2012–2016 (Persen)

Kategori Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.72	7.40	6.75	6.72	6.50
B Pertambangan dan Penggalian	0.39	0.38	0.34	0.31	0.30
C Industri Pengolahan	4.36	4.21	3.99	4.07	3.99
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.15	0.12	0.13	0.16	0.19
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.27	0.25	0.23	0.23	0.22
F Konstruksi	10.30	9.82	8.71	8.34	8.30
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.08	6.77	6.47	6.43	6.29
H Transportasi dan Pergudangan	20.63	21.75	23.69	24.80	25.75
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26.42	27.71	29.02	28.48	28.16
J Informasi dan Komunikasi	6.74	6.11	5.73	5.67	5.55
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.77	2.82	2.69	2.66	2.65
L Real Estat	3.67	3.54	3.38	3.30	3.21
M,N Jasa Perusahaan	0.73	0.71	0.66	0.68	0.69
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.77	3.28	3.22	3.19	3.15
P Jasa Pendidikan	3.01	3.16	3.06	3.00	3.06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.21	1.23	1.20	1.24	1.27
R,S,T,U Jasa lainnya	0.77	0.75	0.71	0.72	0.73
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI

Berbeda dengan kondisi perekonomian pada tahun 2015 baik global maupaun nasional bisa dikatakan kurang baik, mengingat laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional Provinsi Bali mengalami perlambatan dan tidak sesuai target yang telah ditetapkan, perekonomian secara umum pada tahun 2016 dapat dikatakan mengalami perbaikan. Pada tahun 2016 ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,02 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 4,88 persen. Begitupula halnya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, dimana pada tahun 2016, Bali mampu tumbuh sebesar 6,24 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,03 persen.

Sebagai suatu daerah yang dapat dikatakan menganut paham ekonomi terbuka, Kabupaten Badung sedikit tidaknya tentu terkena dampak dari perbaikan kinerja ekonomi baik pusat maupun regional Provinsi Bali. Arus distribusi barang dan jasa tentu dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi daerah sekitarnya. Apalagi Badung yang ditopang oleh sektor tersier terutama industri pariwisatanya, paling besar terkena dampak dari perubahan kondisi ekonomi global bukan saja antar kabupaten dan provinsi, tetapi juga di dunia.

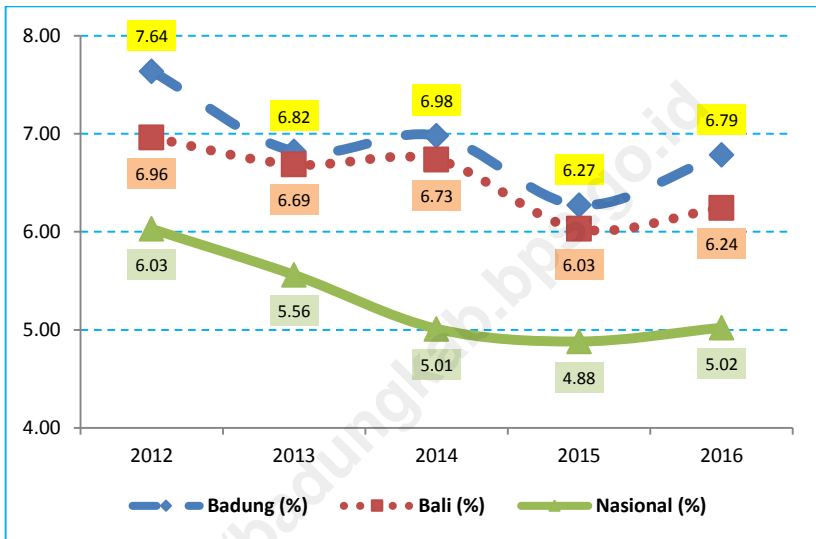
Perbaikan perekonomian yang terjadi di tingkat global, nasional dan tingkat regional Bali juga berdampak pada terjadinya percepatan perekonomian Kabupaten Badung pada tahun 2016. Laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari pertumbuhan

PDRB riil (atas dasar harga konstan) Kabupaten Badung pada tahun 2016 sebesar 6,79 persen, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,27 persen.

Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung selama lima tahun belakangan menunjukkan selalu lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang menarik laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali ke atas, karena kontribusinya yang hampir seperempat total ekonomi Bali. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sebesar 7,64 persen, berada di atas laju Provinsi Bali yang sebesar 6,96 persen. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung kembali terjadi pada tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi sedikit perlambatan ekonomi, karena pada tahun 2012 terjadi puncak pembangunan mega proyek di Kabupaten Badung, walaupun tahun 2013 ekonomi mampu tumbuh, hanya saja pertumbuhannya melambat dibanding tahun sebelumnya. Laju sebesar 6,82 persen terjadi di Kabupaten Badung pada tahun 2013 tersebut, sedangkan Provinsi Bali mampu tumbuh sebesar 6,69 persen. Percepatan ekonomi kembali terjadi pada tahun 2014, baik di Kabupaten Badung maupun di Provinsi Bali masing-masing sebesar 6,98 persen dan 6,73 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 tidak semulus yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Pada tataran nasional bahkan meleset dari target pertumbuhan ekonomi yaitu hanya mencapai 4,88 persen. Percepatan

pertumbuhan ekonomi kembali terjadi pada tahun 2016, baik secara nasional dengan pertumbuhan sebesar 5,02 persen, level regional Provinsi Bali tumbuh sebesar 6,24 persen dan lokal Kabupaten Badung mampu tumbuh sebesar 6,79 persen.

Gambar 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung dan Perbandingannya dengan Provinsi Bali dan Nasional, 2012-2016 (Persen)

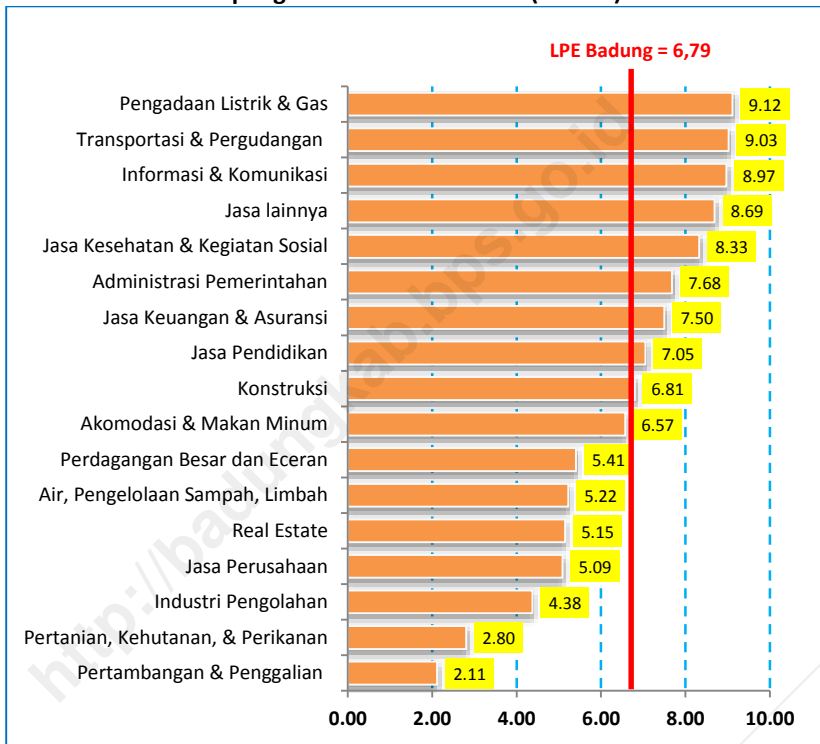


Sumber : BPS Kabupaten Badung (diolah)

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, perekonomian Kabupaten Badung sangat tergantung dari kinerja kepariwisataan. Percepatan kinerja perekonomian Kabupaten Badung 2016 sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih tinggi dari pada tahun 2015. Pada tahun 2015, terjadi pertumbuhan kunjungan wisman mencapai 6,24 persen sementara di Tahun 2016 pertumbuhan kunjungan wisman

mencapai 23,14 persen. Selain itu faktor tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap untuk wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik dapat berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Badung.

Gambar 3.5.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 (Persen)



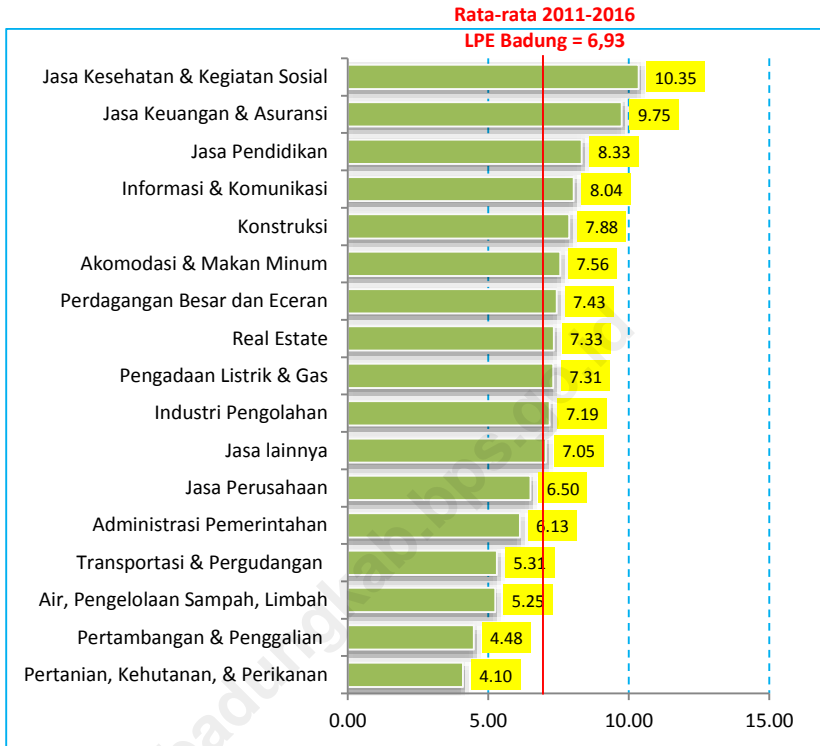
Sumber : BPS Kabupaten Badung (diolah)

Lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 adalah pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 9,12 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan

transportasi dan pergudangan dengan laju pertumbuhan sebesar 9,03 persen. Pada tahun 2016, tidak terdapat lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan. Namun demikian, sebagian lapangan usaha yang ada tumbuh dibawah rata-rata Kabupaten Badung, termasuk akomodasi makan dan minum yang hanya tumbuh sebesar 6,57 persen. Sementara itu terdapat tiga lapangan usaha yang masih tumbuh tetapi dibawah 5 persen yaitu dua diantaranya termasuk sektor primer yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan di bawah 5 persen adalah industri pengolahan yaitu sebesar 4,38 persen.

Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa kategori yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu tersebut adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 10,35 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang kedua diduduki oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,75 persen dan diikuti oleh jasa pendidikan sebesar 8,33 persen. Penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai kategori yang menjadi lapangan usaha dengan kontribusi utama dalam ekonomi Badung memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,56 persen sedangkan lapangan usaha pertanian hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,10 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 3.6.
Rata – Rata Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011–2016 (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Badung (diolah)

Selama periode tahun 2012-2016, terdapat 6 lapangan usaha yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang sebesar 6,93 persen. Lapangan usaha dimaksud tersebut adalah jasa perusahaan (5,92%); administrasi pemerintahan (6,13%); Transportasi dan Pergudangan (5,31%); Pertambangan dan Penggalian (4,48%); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

(5,25%); serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (4,10%).

Tabel 3.2
Laju dan Rata – Rata Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (Persen)

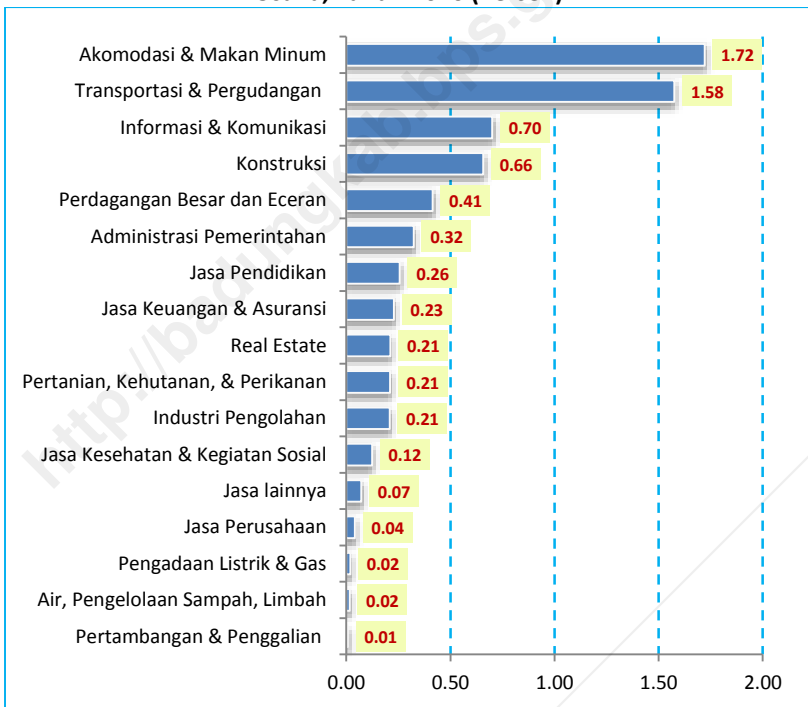
Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.42	1.42	5.31	4.54	2.80	3.63
B	Pertambangan dan Penggalian	15.89	7.27	1.15	-4.02	2.11	5.45
C	Industri Pengolahan	4.89	8.26	10.33	8.08	4.38	6.11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.07	7.89	7.36	1.10	9.12	7.55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.29	5.43	8.76	3.56	5.22	4.39
F	Konstruksi	19.46	5.85	3.16	4.12	6.81	7.64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.05	8.95	8.78	7.97	5.41	7.08
H	Transportasi dan Pergudangan	6.04	6.03	2.73	2.72	9.03	5.92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.14	8.39	7.57	7.11	6.57	7.43
J	Informasi dan Komunikasi	8.20	5.65	8.59	8.79	8.97	8.14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.68	12.79	11.15	8.65	7.50	8.99
L	Real Estat	6.47	6.84	10.45	7.76	5.15	6.81
M,N	Jasa Perusahaan	2.13	9.10	9.12	7.07	5.09	5.92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.12	-0.20	12.43	9.60	7.68	9.35
P	Jasa Pendidikan	0.36	13.64	12.30	8.28	7.05	8.72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.10	12.67	14.12	10.53	8.33	9.66
R,S,T, U	Jasa lainnya	5.00	4.03	9.33	8.21	8.69	7.02
Produk Domestik Regional Bruto		7.64	6.82	6.98	6.27	6.79	6.93

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Indikator yang lebih kompleks untuk mengukur besarnya peranan suatu lapangan usaha terhadap total perekonomian suatu wilayah adalah Sumber Pertumbuhan/*Source of Growth (SoG)*. Sumber pertumbuhan (SoG) ini merupakan penggabungan antara distribusi persentase dengan laju pertumbuhan di tiap-tiap lapangan usaha. Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori terhadap pertumbuhan yang dicapai suatu wilayah.

Gambar 3.7
Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016 (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Badung (diolah)

Gambar 3.7 menunjukkan peranan seluruh kategori terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung. Pada tahun 2016, penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan utama yakni sebesar 1,72 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua adalah dari kategori transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 1,58 persen, dan selanjutnya ada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 0,70 persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar 0,66 persen. Dalam kurun waktu tahun 2011-2016, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum rata-rata memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung selalu di atas 1 (satu) persen, bahkan pada tahun 2012 dan 2013 mampu diatas 2 (dua) persen. Hal ini menunjukkan betapa lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang memberikan sumber pertumbuhan dominan dalam perekonomian Badung selama ini. Terlepas dari dominasinya tersebut, peranan yang besar dari lapangan usaha ini seharusnya diarahkan agar lebih memberi manfaat bagi masyarakat lokal terutama dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan menciptakan pemerataan pendapatan.

Tabel 3.3
Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.53	0.12	0.41	0.35	0.21
B	Pertambangan dan Penggalian	0.06	0.03	0.00	-0.02	0.01
C	Industri Pengolahan	0.22	0.37	0.47	0.38	0.21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
F	Konstruksi	1.81	0.60	0.32	0.41	0.66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.45	0.65	0.65	0.60	0.41
H	Transportasi dan Pergudangan	1.16	1.14	0.51	0.49	1.58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.06	2.14	1.95	1.85	1.72
J	Informasi dan Komunikasi	0.62	0.43	0.65	0.67	0.70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.23	0.35	0.32	0.26	0.23
L	Real Estat	0.26	0.27	0.41	0.32	0.21
M, N	Jasa Perusahaan	0.02	0.07	0.07	0.06	0.04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.05	-0.01	0.48	0.39	0.32
P	Jasa Pendidikan	0.01	0.44	0.42	0.30	0.26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.08	0.16	0.19	0.15	0.12
R,S, T,U	Jasa lainnya	0.04	0.03	0.07	0.07	0.07
Produk Domestik Regional Bruto		7.64	6.82	6.98	6.27	6.79

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.3 PDRB PERKAPITA

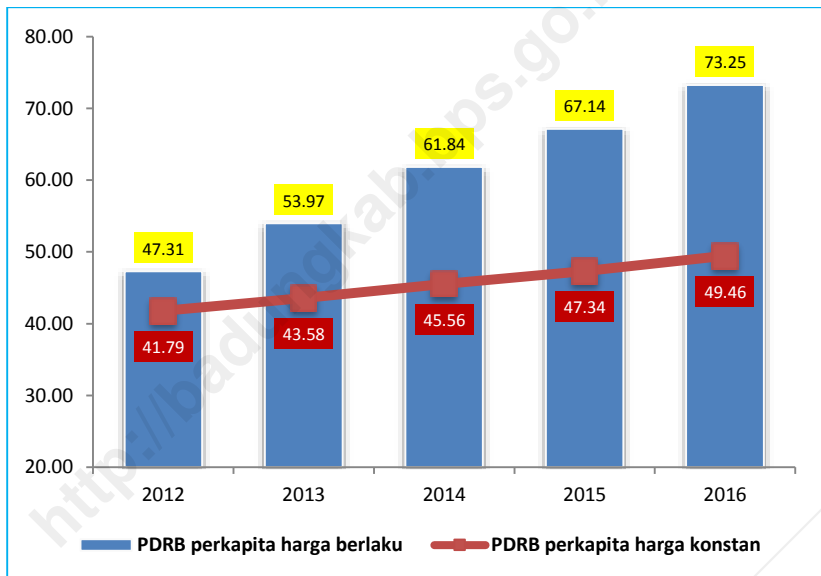
Indikator yang dapat menggambarkan besarnya kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi adalah

PDRB perkapita yang merupakan turunan dari PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan. PDRB perkapita dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Walaupun hanya merupakan gambaran "kasar" ukuran kesejahteraan suatu wilayah, indikator ini dapat diperbandingkan antar daerah atau antar tahun. Dikatakan kasar dikarenakan PDRB merupakan nilai tambah yang dihasilkan di suatu wilayah tanpa memperhitungkan siapa yang menghasilkan nilai tambah tersebut (residen atau bukan residen). Bisa jadi pemilik suatu perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Badung bertempat tinggal di luar Pulau Bali, namun nilai tambah yang dihasilkan di Kabupaten Badung tetap menghitung nilai tambah perusahaan tersebut, walaupun sang pemilik bukan merupakan penduduk Kabupaten Badung. Sehingga PDRB perkapita lebih tepat merupakan gambaran kemakmuran suatu wilayah, dan belum tepat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah atau wilayah makin sejahtera atau makmur. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah atau wilayah bersangkutan.

PDRB perkapita Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 73,25 juta. Angka ini

menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Badung menerima pendapatan sebesar Rp. 73,25 juta selama 2016. Jumlah ini meningkat sebanyak Rp. 6,11 juta atau 9,10 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2012 – 2016, rata-rata PDRB perkapita harga berlaku penduduk Badung mencapai Rp. 60,70 juta.

Gambar 3.8
PDRB Per Kapita Harga Berlaku dan Harga Konstan
Kabupaten Badung, 2012 – 2016
(juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Badung (diolah)

Jika dilihat berdasarkan harga konstan, maka PDRB perkapita Kabupaten Badung yang terbentuk di Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 49,46 juta. Peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Badung atas

dasar harga konstan sebesar 4,48 persen cukup jauh jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2016 yang sebesar 2,21 persen. Beberapa indikator agregatif dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Badung,
2012 – 2016

Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	27.200,75	31.790,03	37.273,28	41.384,28	46.147,88
PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)	24.027,65	25.666,53	27.458,06	29.180,48	31.160,58
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (000 Org)	575,0	589,0	602,7	616,4	630,0
PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rp)	47,31	53,97	61,84	67,14	73,25
PDRB Per Kapita Harga Konstan (Juta Rp)	41,79	43,58	45,56	47,34	49,46

Besaran angka PDRB perkapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat manakala pemilik akumulasi modal dimiliki oleh penduduk domestik wilayah tersebut, dalam hal ini yang dimaksud adalah penduduk Kabupaten Badung. Namun demikian, angka PDRB perkapita setidaknya dapat dijadikan sebagai gambaran umum mengenai perekonomian yang terjadi di Kabupaten Badung telah mengalami perkembangan positif secara makro.



Bab IV
PERTUMBUHAN DAN PERANAN PDRB
MENURUT LAPANGAN USAHA

<http://badungkab.bps.go.id>

<http://badungkab.bps.go.id>

Angka PDRB Kabupaten Badung menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi sublapangan usaha. Rincian dalam kategori menjadi sublapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha akan diuraikan di bawah ini.

4.1 PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mencakup tiga sublapangan usaha yakni: sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian; sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu serta sublapangan usaha perikanan. Sub lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian kemudian dipilah lagi menjadi 5 (lima) sub dibawahnya yakni tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan serta jasa pertanian dan perburuan.

Walaupun bukan pendorong utama perekonomian Kabupaten Badung, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ini sangat penting artinya sebagai penunjang dan penopang perekonomian Kabupaten Badung terutama terhadap faktor eksternal. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, perekonomian yang didorong oleh kegiatan sektor tersier sangat rentan terhadap faktor-faktor eksternal. Seperti misalnya masalah

keamanan dan kenyamanan. Sebagai contoh, pada saat Bom Bali terjadi, baik Bom Bali I maupun Bom Bali II, perekonomian Kabupaten Badung mengalami penurunan yang tajam. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu lapangan usaha yang masih bisa bertahan. Tenaga kerja sektor tersier pun akhirnya sebagian beralih ke lapangan usaha ini karena dampak dari keamanan yang terganggu menyebabkan industri pariwisata menjadi lesu.

Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan secara umum terus mengalami penurunan, sampai pada tahun 2016 hanya sebesar 6,50 persen dari total PDRB Badung. Dengan kontribusi tersebut, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan hanya mampu menyumbang sumber pertumbuhan sebesar 0,21 persen dari 6,79 persen laju pertumbuhan ekonomi Badung. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab lemahnya kontribusi dan sumbangan sektor ini, selain karena alih fungsi lahan juga dapat karena faktor cuaca yang tidak menentu.

Kontribusi sublapangan usaha terhadap kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, menunjukkan bahwa sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memiliki kontribusi paling besar dari ketiga sublapangan usaha yang ada, yaitu mencapai 87,85 persen pada tahun 2016. Penyumbang terbesar pada sublapangan usaha ini adalah sub-

sublapangan usaha peternakan, yaitu mencapai 48,84 persen pada tahun 2016, sedangkan posisi berikutnya ditempati oleh sub-sublapangan usaha tanaman pangan sebesar 19,19 persen dan sub-sublapangan usaha tanaman hortikultura sebesar 16,24 persen. Kontribusi sub-sublapangan usaha tanaman perkebunan dan sub-sublapangan usaha jasa pertanian/perburuan terhadap kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan secara berturut sebesar 1,72 persen dan 1,85 persen.

Tabel 4.1.
Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Badung 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	89.01	89.14	88.58	88.37	87.85
a. Tanaman Pangan	22.49	21.00	19.62	19.39	19.19
b. Tanaman Hortikultura	14.35	14.11	14.28	16.91	16.24
c. Tanaman Perkebunan	1.96	1.87	1.80	1.83	1.72
d. Peternakan	48.51	50.43	51.17	48.51	48.84
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1.70	1.72	1.70	1.73	1.85
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Perikanan	10.99	10.86	11.42	11.63	12.15
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan Badung tumbuh sebesar 2,80 persen tahun 2016. Hal ini dapat tergambar dari Angka Tetap produksi padi dan jagung Kabupaten Badung pada tahun 2016, produksi padi meningkat sebesar 3,55 persen dan produksi jagung meningkat sebesar 15,44 persen. Kontribusi sub-sublapangan usaha tanaman pangan mencapai 19,19 persen, masih lebih tinggi dari kontribusi sub-sublapangan usaha tanaman hortikultura yang sebesar 16,24 persen. Produk hortikultura lebih banyak dihasilkan di Badung Utara, terutama di Kecamatan Petang. Komoditas utama dari hortikultura di Badung utara seperti bunga yang menjadi bahan pokok persembahyangan pada masyarakat Bali, dan juga sayur-sayuran.

Kontribusi sublapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian adalah yang dominan, namun sublapangan usaha perikanan hanya berkontribusi sebesar 12,15 persen pada tahun 2016. Terlebih lagi produksi perikanan laut menurut data Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dilaporkan nihil pada triwulan IV 2016, sehingga produksi ikan laut turun mencapai kisaran 29,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain perikanan tangkap, perikanan budidaya juga memiliki andil dalam penciptaan nilai tambah pada sublapangan usaha perikanan.

4.2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Kabupaten Badung mencatat nilai tambah dari kategori pertambangan dan penggalian dengan kontribusi hanya 0,30 persen dari total PDRB Badung pada tahun 2016. Proses produksi penggalian terdapat di Badung bagian selatan dan sedikit di Badung utara. Jika di Badung bagian selatan memproduksi *limestone*, Badung bagian utara memiliki penggalian tanah urug. Namun, selama beberapa tahun belakangan produksi penggalian menurun tajam dikarenakan adanya pembatasan ijin penggalian dari pemerintah daerah setempat mengingat kelestarian alam juga harus tetap diperhatikan. Ijin yang masih diberikan hanya untuk penataan lahan saja, selain itu sudah dapat dikatakan tidak ada lagi.

Tabel 4.2.
Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha
Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Badung
2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	NA	NA	NA	NA	NA
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	NA	NA	NA	NA	NA
3. Pertambangan Bijih Logam	NA	NA	NA	NA	NA
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertambangan dan Penggalian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

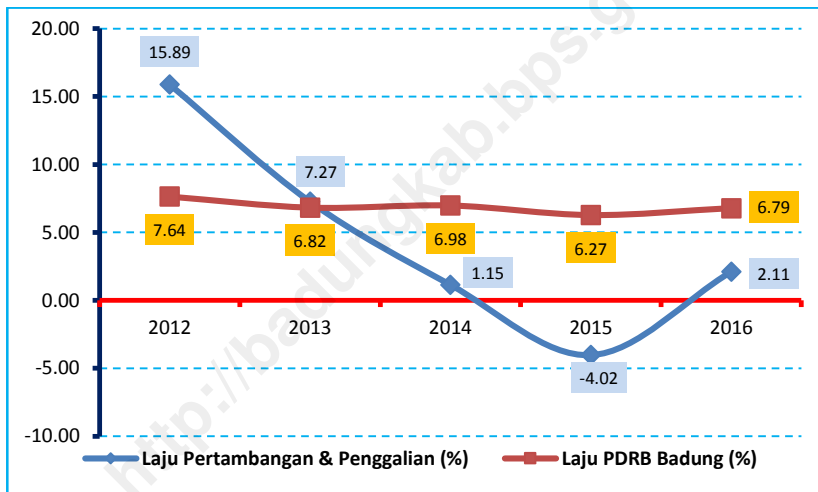
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

BAB IV Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian terbagi menjadi 4 sub lapangan usaha, yakni pertambangan minyak, pertambangan batubara, pertambangan bijih logam dan penggalian lainnya. Untuk Kabupaten Badung sendiri, hanya sub lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya yang tersedia itupun hanya galian C.

Gambar 4.1.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung dan Lapangan Usaha Pertambangan & Penggalian 2012 - 2016 (Persen)



Laju pertumbuhan kategori pertambangan dan penggalian menunjukkan kecenderungan yang menurun selama tahun 2012-2016, dan tidak sejalan dengan laju perekonomian Badung keseluruhan. Selama periode tersebut bahkan terjadi lembah di

tahun 2015 ini yakni sampai minus 4,02 persen. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai larangan penggalian Galian C (Pasir dan Batu) di kabupaten Badung. Adanya pelarangan tersebut tentunya membuat para penggali menghentikan kegiatannya sehingga nilai tambah dari sektor ini pun menurun drastis. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,11 persen, akan tetapi kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian ini mencatat sumber pertumbuhan paling rendah di kabupaten Badung yang hanya sebesar 0,01 persen dari sebesar 6,79 persen pertumbuhan ekonomi Badung.

4.3 INDUSTRI PENGOLAHAN

Sebagai daerah pusat pariwisata, Kabupaten Badung memiliki potensi yang cukup besar dari lapangan usaha industri pengolahan. Pada tahun 2016 lapangan usaha ini menyumbang 3,99 persen terhadap keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan di Kabupaten Badung. Salah satu industri yang cukup banyak di Badung adalah industri pengolahan kayu, anyaman yang terbuat dari bambu, rotan dan sejenisnya. Produksi kerajinan tersebut banyak diminati oleh wisatawan termasuk konsumsi lokal.

BAB IV Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Tabel 4.3.

Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Badung, 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Industri Makanan dan Minuman	32.65	32.68	33.37	34.32	35.87
3 Industri Pengolahan Tembakau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4.80	4.70	4.52	4.58	4.68
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6.31	6.35	6.14	6.00	5.63
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	33.28	33.40	33.20	32.87	32.27
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1.17	1.14	1.08	1.04	0.99
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.59	3.50	3.32	3.02	2.85
10 Industri Barang Galian bukan Logam	2.85	3.03	3.01	3.04	2.98
11 Industri Logam Dasar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	1.10	1.08	1.01	1.00	0.98
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
14 Industri Alat Angkutan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
15 Industri Furnitur	9.57	9.78	10.03	10.10	9.93
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4.50	4.17	4.14	3.87	3.67
Industri Pengolahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

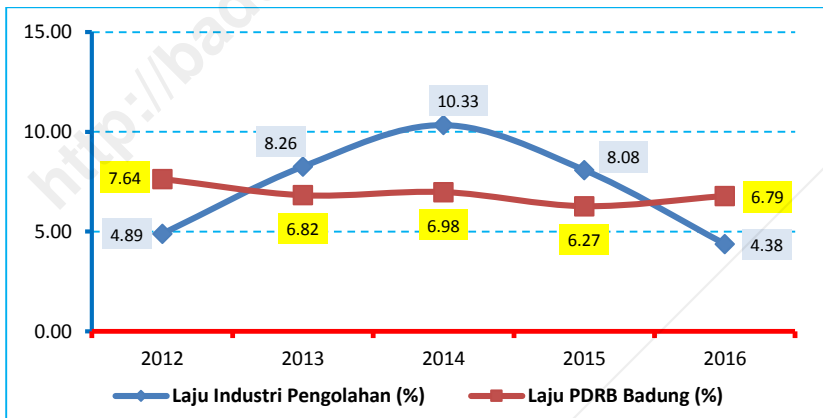
** Angka sangat sementara

Selain industri kerajinan dari bambu dan rotan, industri yang berkembang sangat pesat di Kabupaten Badung adalah industri makanan dan minuman. Kabupaten Badung cukup berpotensi untuk

mengembangkan industri makanan dan minuman karena merupakan salah satu daerah tujuan migran. Kehidupan yang serba praktis menyebabkan industri makanan dan minuman menjadi penyokong industri terbesar di Kabupaten Badung. Kontribusi industri makanan dan minuman pada tahun 2016 sebesar 35,87 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 34,32 persen.

Sublapangan usaha industri yang juga memiliki kontribusi cukup tinggi yaitu industri *furniture*, dengan kontribusi sebesar 9,57 persen pada tahun 2012 dan memiliki kecenderungan yang terus meningkat hingga tahun 2015 mencapai 10,10 persen, dan sedikit menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 9,93 persen.

Gambar 4.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Badung dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, 2012 - 2016 (Persen)



Laju pertumbuhan lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2016 adalah sebesar 4,38 persen. Adapun sublapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi adalah industri makanan dan minuman yakni sebesar 6,47 persen. Posisi kedua ada pada kelompok sublapangan usaha industri barang dari logam, komputer dan barang elektronik, Optik dan Peralatan Listrik dengan laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen.

Hampir seluruh sublapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif pada 2016 kecuali untuk sub lapangan usaha industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, industri ini mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,83 persen.

4.4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas berkontribusi sebesar 0,19 persen terhadap total ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2016. Kontribusi ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,16 persen terhadap total ekonomi Kabupaten Badung.

Hampir keseluruhan kontribusi lapangan usaha pengadaan listrik dan gas disumbangkan oleh sublapangan usaha Ketenagalistrikan yaitu sebesar 98,53 persen, dan hanya sebesar 1,47 persen dari sublapangan usaha pengadaan gas dan produksi es pada tahun 2016. Kontribusi ketenagalistrikan yang cenderung

meningkat dari tahun ke tahun menandakan bahwa kebutuhan akan listrik selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Tabel 4.4.
Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha
Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Badung
2012-2015 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Ketenagalistrikan	98.06	97.76	98.07	98.28	98.53
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	1.94	2.24	1.93	1.72	1.47
Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Bila diperhatikan dari laju pertumbuhannya, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas meningkat sebesar 9,12 persen pada tahun 2016. Sublapangan usaha ketenagalistrikan meningkat sebesar 9,14 persen. Sementara itu laju pertumbuhan untuk sublapangan usaha pengadaan gas dan produksi es adalah sebesar 7,63 persen.

4.5 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG

Lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bisa jadi cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Badung, selama ini yang banyak dikelola adalah

pengadaan air, sedangkan pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang kemungkinan dapat ditingkatkan lebih banyak lagi. Hal tersebut juga telah mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meluncurkan program GOTIK (Gojek Sampah Plastik), dimana masyarakat tinggal menghubungi lewat sms, ataupun facebook maka petugas akan menjemput sampah plastik dari warga dan selanjutnya dilakukan proses daur ulang.

Kontribusi lapangan usaha ini terhadap keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan di Kabupaten Badung hanya mencapai 0,22 persen tahun 2016, cenderung stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Angka yang cukup kecil jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya.

Ditinjau dari laju pertumbuhannya, lapangan usaha pengadaan air ini terlihat berfluktuatif. Di tahun 2012, lapangan usaha ini tumbuh sebesar 3,29 persen kemudian di tahun 2013 menjadi 5,43 persen. Selanjutnya di tahun 2014, lapangan usaha ini tumbuh cukup pesat yakni sebesar 8,76 persen. Sementara itu, pada tahun berikutnya lapangan usaha ini tumbuh melambat menjadi hanya 3,56 persen tahun 2015, dan kembali mengalami percepatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,22 persen.

4.6 KONSTRUKSI

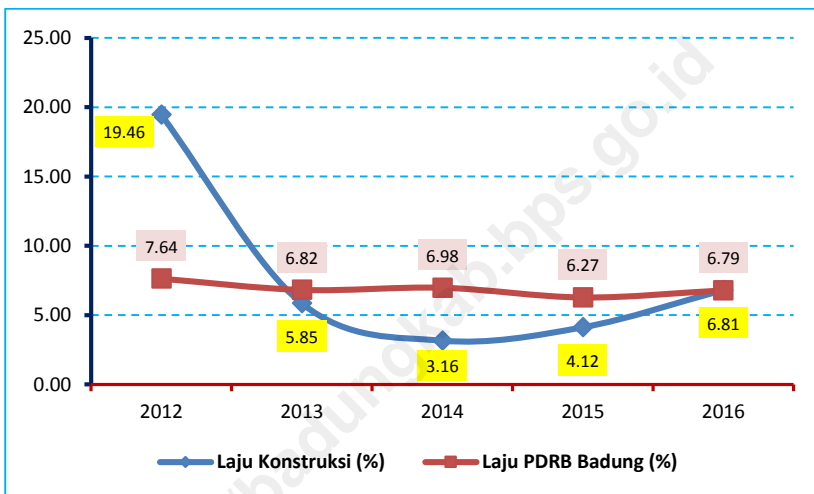
Pembangunan fisik dapat dikatakan sebagai salah satu yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembangunan fisik di Kabupaten Badung yang dapat digambarkan dari lapangan usaha konstruksi merupakan salah satu penyumbang terbesar ketiga setelah penyediaan akomodasi dan makan minum serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Kontribusi lapangan usaha ini mencapai 8,30 persen pada tahun 2016. Adanya moratorium pembangunan hotel sedikit tidaknya mengerem laju pembangunan fisik di Kabupaten Badung. Sementara itu, pembangunan prasarana fisik oleh pemerintah daerah maupun swasta cukup dapat meningkatkan nilai tambah dari lapangan usaha konstruksi.

Lapangan usaha konstruksi secara keseluruhan mampu menghasilkan nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sekitar Rp. 3,83 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sekitar Rp. 3,01 triliun. Jika dilihat dari pertumbuhannya, maka laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi berfluktuatif selama tahun 2012 - 2016. Percepatan pertumbuhan terjadi tahun 2016 sebesar 6,81 persen dari pertumbuhan lapangan usaha konstruksi tahun 2015 sebesar 4,12 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2012 yakni mencapai 19,46 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut ada pembangunan 3 mega proyek di Bali yakni

BAB IV Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pembangunan Tol Bali Mandara, Bandara Ngurah Rai dan *Underpass* Simpang Dewa Ruci. Perkembangan laju pertumbuhan selama tahun 2012-2016 untuk lapangan usaha konstruksi dapat terlihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3.
Laju Pertumbuhan PDRB Badung dan Lapangan Usaha Konstruksi
2012 - 2016 (Persen)



4.7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sampai dengan tahun 2016 selalu menyumbang di atas 6 (enam) persen terhadap total PDRB Kabupaten Badung, meskipun menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahunnya. Sementara pada tahun 2016, lapangan usaha ini

mampu memberikan kontribusi sebesar 6,29 persen. Kontribusi sebesar 6,29 persen tersebut disumbangkan oleh sublapangan usaha perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya sebesar 21,34 persen dan dari sublapangan usaha perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sebesar 78,66 persen.

Tabel 4.5.
Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
Kabupaten Badung, 2012-2015 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	21.39	22.05	20.76	20.98	21.34
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	78.61	77.95	79.24	79.02	78.66
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 2,90 triliun atas dasar harga berlaku dan sebesar Rp. 2,36 triliun atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perlambatan, yang mampu naik sebesar 5,41 persen pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya 7,97 persen.

4.8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub lapangan usaha, yaitu angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP), angkutan udara, serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan. Kegiatan transportasi dan pergudangan sublapangan usaha angkutan rel, angkutan laut dan ASDP di Kabupaten Badung tidak tersedia sehingga untuk sublapangan usaha ini tidak menciptakan nilai tambah.

Lapangan usaha ini merupakan penyumbang kontribusi terbesar kedua setelah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Badung seperti yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya. Selama periode tahun 2012-2016 kontribusi lapangan usaha ini selalu di atas 20 persen bahkan yang distribusi persentase tertinggi adalah pada tahun 2016 yakni sebesar 25,75 persen. Pola yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Lapangan usaha ini mampu memberikan nilai tambah berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 11,89 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 5,55 triliun pada tahun 2016.

Sublapangan usaha yang mendominasi lapangan usaha transportasi dan pergudangan di Kabupaten Badung adalah angkutan udara. Sublapangan usaha ini mampu menciptakan nilai

tambah hampir 90-an persen dari seluruh nilai tambah transportasi dan pergudangan yang tercipta, tepatnya pada tahun 2016 sebesar 92,31 persen. Kontribusi untuk sublapangan usaha angkutan udara mampu menciptakan nilai tambah hampir seperempat dari total nilai tambah Kabupaten Badung yaitu sebesar 23,77 persen terhadap terhadap seluruh nilai tambah tahun 2016.

Tabel 4.6.
Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha
Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Badung,
2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Angkutan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Angkutan Darat	3.26	3.14	2.81	2.56	2.37
3 Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Angkutan Udara	88.94	89.98	91.39	92.10	92.31
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	7.79	6.88	5.81	5.34	5.32
Transportasi dan Pergudangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Bandara Ngurah Rai merupakan satu-satunya fasilitas yang menunjang sublapangan usaha angkutan udara. Bandara yang menjadi bandara terbaik di dunia berdasarkan survei *Airport Council*

International (ACI) ini mampu menyumbang nilai tambah yang semakin meningkat seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali. Sublapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir menyumbang sebesar sebesar 5,32 persen terhadap kategori angkutan dan pergudangan pada tahun 2016. Selanjutnya angkutan darat mampu berkontribusi sebesar 2,37 persen pada tahun 2016 dan mengalami tren kontribusi yang menurun dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2016 mengalami percepatan yang cukup berarti yaitu mencapai 9,03 persen yang sebelumnya mampu tumbuh sebesar 2,72 persen. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perbaikan perekonomian baik lokal, nasional dan global pada tahun 2016.

4.9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Lapangan usaha penyumbang nilai tambah terbesar di Kabupaten Badung adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Kategori lapangan usaha ini mampu berkontribusi hampir 30 persen selama periode 2012-2016, dan pada tahun 2016 mencapai sebesar 28,16 persen. Kunjungan wisatawan yang mencapai 4,93 juta orang pada tahun 2016 menjadi salah satu faktor meningkatnya nilai tambah yang dihasilkan

lapangan usaha ini. Nilai tambah berdasarkan harga berlaku pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2016 mencapai Rp. 12,99 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 11,79 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 8,14 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,64 triliun pada tahun 2015.

Tabel 4.7.
Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Badung 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Penyediaan Akomodasi	67.83	70.47	73.42	72.87	72.55
2 Penyediaan Makan Minum	32.17	29.53	26.58	27.13	27.45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

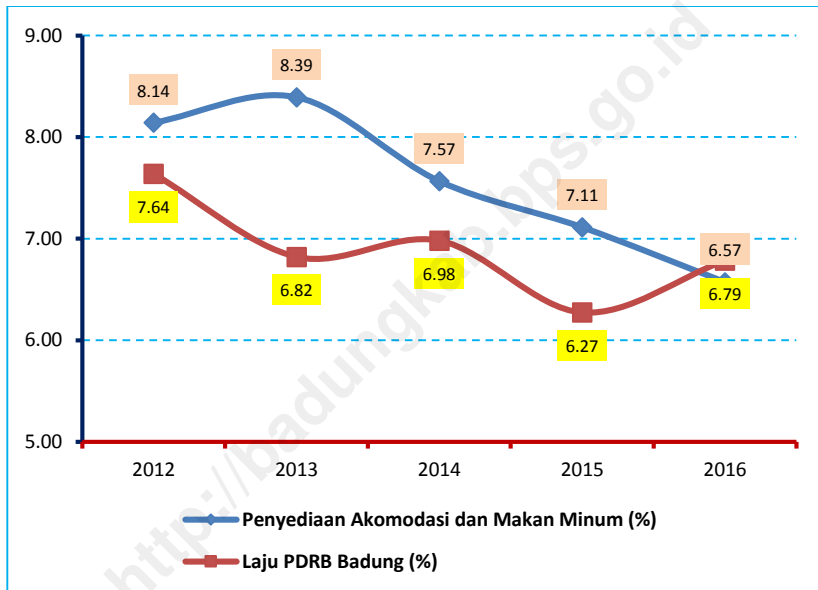
** Angka sangat sementara

Keterbandingan kontribusi antara sublapangan usaha penyediaan akomodasi dan sublapangan usaha makan minum dari tahun ke tahun hampir tetap sama. Kontribusi sublapangan usaha penyediaan akomodasi selalu lebih besar dari kontribusi sublapangan usaha penyediaan makan minum. Sublapangan usaha

BAB IV Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha

penyediaan akomodasi pada tahun 2016 mempunyai kontribusi sebesar 72,55 persen dalam kategorinya lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi sublapangan usaha penyediaan makan minum yang sebesar 27,45.

Gambar 4.4.
Laju Pertumbuhan PDRB dan laju Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Badung 2012-2016 (Persen)



Laju pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2016 sebesar 6,57 persen, mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 7,11 persen. Pola pertumbuhan selama periode 2011-2016 antara lapangan usaha penyediaan akomodasi dan

makan minum dengan laju perekonomian Badung nampak sejalan. Hal ini cukup beralasan karena dominannya kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dari tahun ke tahun di Kabupaten Badung.

4.10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

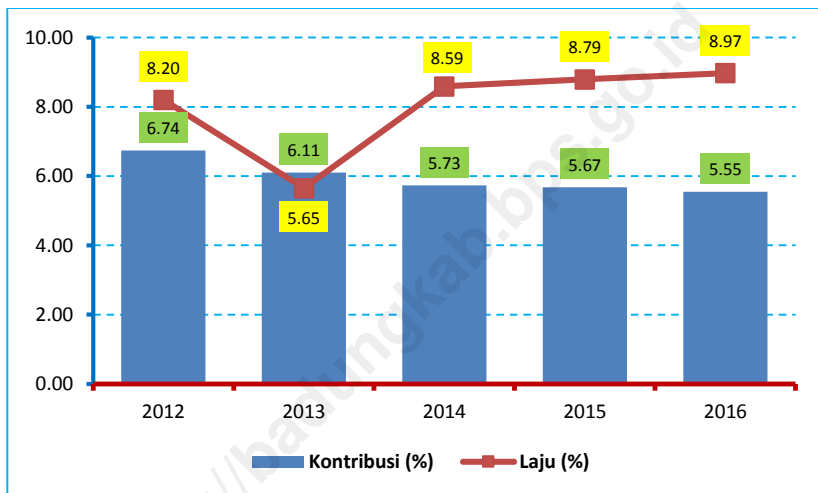
Lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan lapangan usaha ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Badung selama tahun 2012-2016 sekitar 5 persen. Tercatat selama tahun 2016, lapangan usaha ini memberikan sumbangan sebesar 5,55 persen terhadap total ekonomi Kabupaten Badung.

Perkembangan penggunaan media sosial yang dapat dikatakan masif belakangan ini membuat laju pertumbuhan untuk lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi tinggi dalam beberapa tahun ini dan pada tahun 2016 mencapai 8,97 persen. Laju pertumbuhan tersebut adalah yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, kontribusi lapangan usaha informasi dan komunikasi terlihat menurun walaupun terjadi peningkatan laju pertumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan laju pertumbuhan pada kategori lapangan usaha informasi dan

BAB IV Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha

komunikasi merupakan peningkatan antar tahunnya atas dasar harga konstan, sedangkan kontribusi peranan lapangan usaha tersebut merupakan proporsi terhadap penciptaan nilai tambah keseluruhan pada tahun bersangkutan.

Gambar 4.5.
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha
Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung
2012-2016 (Persen)



4.11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

Jasa keuangan dan asuransi mampu menghasilkan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 1,22 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 957,43 milyar pada tahun 2016. Selama kurun waktu 2012-2016, jasa keuangan

mampu memberikan kontribusi sekitar 2,5 persen sampai dengan 3 persen terhadap total ekonomi Kabupaten Badung. Kontribusi lapangan usaha ini di tahun 2016 sebesar 2,65 persen. Apabila dilihat peran sublapangan usaha terhadap lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi tersebut, sebesar 82,82 persen disumbangkan oleh jasa perantara keuangan. Sedangkan asuransi dan dana pensiun dan jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan masing-masing sebesar 6,55 persen; 10,55 persen dan 0,07 persen pada tahun 2016.

Tabel 4.8.
Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Kabupaten Badung 2012-2016 (Persen)

Sublapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Jasa Perantara Keuangan	81.06	82.53	82.48	82.35	82.82
2 Asuransi dan Dana Pensiun	6.99	6.55	6.65	6.66	6.55
3 Jasa Keuangan Lainnya	11.89	10.86	10.80	10.92	10.55
4 Jasa Penunjang Keuangan	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika ditinjau dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2016 lapangan usaha ini tetap tumbuh walaupun mengalami perlambatan yaitu sebesar 7,50 persen. Pertumbuhan tertinggi adalah pada sublapangan usaha asuransi dan dana pensiun yaitu sebesar 8,69 persen disusul oleh jasa perantara keuangan di posisi kedua yakni sebesar 7,65 persen. Sementara itu, jasa penunjang keuangan dan jasa keuangan lainnya masing masing tumbuh sebesar 7,22 persen dan 5,73 persen.

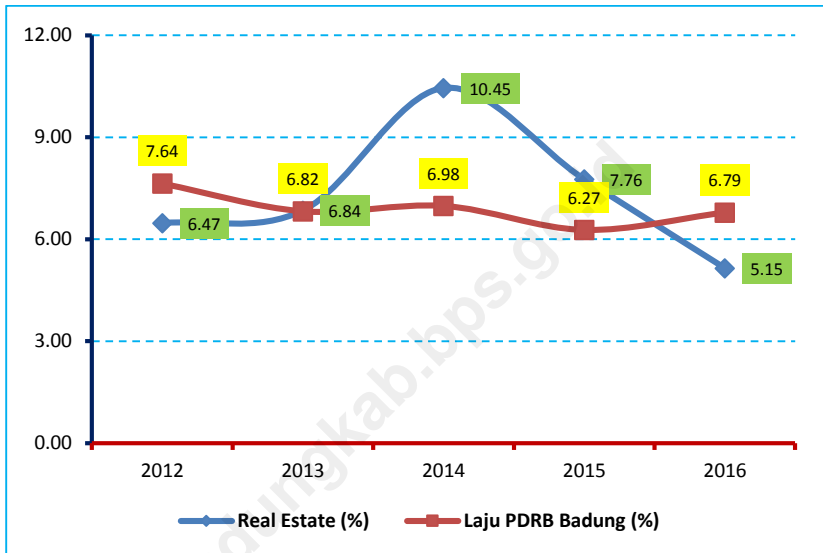
4.12 REAL ESTATE

Lapangan usaha real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Badung yakni di kisaran 3 persen. Selama tahun 2012-2016, secara berturut-turut sumbangan lapangan usaha real estate terhadap perekonomian Bali adalah sebesar 3,67 persen; 3,54 persen; 3,38 persen, 3,30 persen dan 3,21 persen.

Laju pertumbuhannya lapangan usaha real estate cenderung berfluktuatif selama tahun 2012-2016. Perlambatan pertumbuhan kembali terjadi pada tahun 2016 yang hanya tumbuh sebesar 5,15 persen setelah tahun 2015 tumbuh sebesar 7,76 persen yang juga melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,45 persen tahun 2014. Melambatnya lapangan usaha ini salah satunya kemungkinan sebagai imbas dari melesunya aktifitas properti pada umumnya.

Kelesuan pasar properti ini tidak lepas dari perilaku konsumen, serta kemungkinan adanya kebijakan terkait di bidangnya.

Gambar 4.6.
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estate
2012-2016 (Persen)



4.13 JASA PERUSAHAAN

Kontribusi kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa perusahaan relatif kecil dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sumbangan lapangan usaha ini terhadap perekonomian Kabupaten Badung cenderung stabil rendah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 kontribusi dari lapangan usaha ini mencapai hanya 0,69 persen

sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sedikit berfluktuasi.

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini terbilang cukup berfluktuasi dalam periode 2012-2016. Tercatat pada tahun 2012 pertumbuhan pada lapangan usaha ini sebesar 2,13 persen, sempat tercatat tumbuh sebesar 9,10 persen dan 9,12 pada tahun 2013 dan tahun 2014. Sementara itu, pada tahun 2015, pertumbuhan pada lapangan usaha ini adalah sebesar 7,07 persen dan turun menjadi 5,09 persen pada tahun 2016.

4.14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Nilai tambah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dipengaruhi oleh besarnya output yang dihasilkan oleh abdi negara khususnya Aparatur Sipil Negara. Segala kegiatan pemerintahan, baik itu pemerintah daerah Kabupaten Badung maupun kegiatan instansi pusat yang berada di Kabupaten Badung menghasilkan nilai tambah dan masuk pada lapangan usaha ini. Nilai tambah lapangan usaha ini baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai tambah yang dihasilkan atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 1,45 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 1,32 triliun.

Peranan lapangan usaha ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 peranan lapangan usaha ini mencapai 3,77 persen, tahun 2013 sebesar 3,28 persen, terus menurun hingga menjadi 3,22 persen pada tahun 2014, tahun 2015 menjadi 3,19 persen, dan pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 3,15 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu, dimana pada tahun 2016 kembali terjadi perlambatan pertumbuhan yaitu mencapai 7,68 persen yang sebelumnya mampu tumbuh sebesar 9,60 persen pada tahun 2015.

4.15 JASA PENDIDIKAN

Lapangan usaha jasa pendidikan memiliki distribusi persentase pada kisaran angka 3 persen. Perkembangan kontribusi lapangan usaha ini dalam perekonomian Kabupaten Badung cenderung stabil. Pada tahun 2016 jasa pendidikan memiliki kontribusi sebesar 3,15 persen, hampir tidak berubah dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,19 persen.

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini pada tahun 2016 mengalami perlambatan yang hanya mampu tumbuh sebesar 7,05 persen yang sebelumnya mampu tumbuh sebesar 8,28 persen. Sementara itu, nilai tambah yang mampu dihasilkan oleh

lapangan usaha ini sebesar Rp. 1,41 triliun (atas dasar harga berlaku) dan sebesar Rp. 1,14 triliun (atas dasar harga konstan).

4.16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencatat perlambatan laju pertumbuhan pada tahun 2016. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2016 mencapai 8,33 persen, sedikit melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,53 persen. Sementara itu rata-rata laju pertumbuhan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2016, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial menempati posisi pertama yaitu sebesar 10,35 persen diantara seluruh kategori lapangan usaha yang ada. Perkembangan lapangan usaha ini semakin pesat sejak bertambahnya layanan kesehatan di Kabupaten Badung. Pemberian layanan BPJS dan KBS (Kartu Badung Sehat) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih intens menjaga kesehatan mereka. Selain itu, penambahan sarana kesehatan berupa penambahan rumah sakit misalnya saja di daerah Badung selatan juga memberikan dampak percepatan ekonomi pada lapangan usaha ini. Sehingga wajar lapangan usaha ini jika dilihat dari nilai nominal atas dasar harga berlaku mampu menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 586,83 milyar, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 468,67 milyar pada tahun 2016.

4.17 JASA LAINNYA

Kontribusi lapangan usaha jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Badung relatif kecil yaitu yakni hanya sebesar 0,73 persen di tahun 2016. Namun jika dilihat dari laju pertumbuhannya, pertumbuhan pada lapangan usaha ini relatif tinggi diantara lapangan usaha yang lain. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 8,69 persen.


Dalam hal ini kebutuhan masyarakat terhadap hiburan misalnya sudah semakin meningkat. Kehidupan masyarakat yang lebih modern menuntut masyarakat untuk sengaja menyisakan waktu untuk melakukan refreshing, dan jasa hiburan yang sangat berkembang pesat di Kabupaten Badung yang mampu menyediakan fasilitas hiburan tersebut. Selain itu, yang termasuk juga dalam kegiatan jasa lainnya misalnya saja jasa pembantu di rumah tangga, sopir, tukang kebun dan lainnya. Penggunaan jasa mereka dalam membantu kegiatan kerumahtanggaan semakin berkembang dewasa ini. Bahkan permintaan terhadap jasa ini melebihi penawaran yang tersedia yang tergambar dari sulitnya mencari tenaga yang dikenal dengan asisten rumah tangga.

<http://badungkab.bps.go.id>



PENUTUP

<http://badungkab.bps.go.id>



<http://badungkab.bps.go.id>

Struktur perekonomian Kabupaten Badung sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih didominasi oleh sektor tersier atau jasa-jasa. Dengan mengandalkan industri pariwisata sebagai *leading sector*, keamanan dan kenyamanan tentu menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Secara pelan namun pasti, PDRB Kabupaten Badung juga telah mengalami pergeseran struktur dalam kurun waktu 2012-2016. Walaupun upaya-upaya dalam meningkatkan pembangunan bidang pertanian di Badung telah banyak dilakukan, kecepatan bersaing dengan lapangan usaha lainnya khususnya pada industri pariwisata tidak dapat dikejar begitu saja. Namun sinergitas dari kedua sector ini tentu akan sangat berguna bagi kelangsungan pariwisata di Kabupaten Badung pada nantinya. Budaya pertanian masih harus tetap dipertahankan karena daya tarik itulah yang diminati oleh para wisatawan khususnya mancanegara. Apabila lapangan usaha pertanian mampu *mensupply* bahan makanan untuk industri pariwisata, tentunya akan sangat saling menguntungkan dan mampu mempercepat lagi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung.

Perekonomian Badung dapat dikatakan mengalami percepatan pada tahun 2016 setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan. Hal ini, kemungkinan disebabkan karena terjadinya perbaikan-perbaikan kinerja ekonomi global yang secara

tidak langsung mempengaruhi perekonomian Negara-negara asal para wisatawan mancanegara. Selain hal tersebut, beberapa kejadian bencana alam yang terjadi pada tahun 2015, seperti mengakibatkan ditutupnya Bandara Ngurah Rai selama beberapa hari, pada tahun 2016 tidak terjadi lagi. Pada lapangan usaha pertanian kembali mengalami perlambatan, kemungkinan disebabkan dari keadaan cuaca yang tidak menentu sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dapat dikatakan sangat baik karena menempati posisi pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016. Bahkan ekonomi Badung berada diatas laju perekonomian Provinsi Bali dan juga nasional. Pencapaian laju pertumbuhan sebesar 6,79 bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi dengan sinergitas dari segala pihak, hal tersebut dapat terwujud dengan baik. Diharapkan dengan adanya percepatan ekonomi yang terjadi dapat memperluas lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Badung sehingga pertumbuhan ekonomi inklusif bukanlah suatu angan-angan semata.



LAMPIRAN

<http://badungkab.bps.go.id>

A thin, light gray diagonal line runs from the bottom right towards the center of the page.

<http://badungkab.bps.go.id>

Lampiran 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.100.216,1	2.352.690,3	2.516.298,5	2.782.470,9	3.001.684,3
B Pertambangan dan Penggalian	105.551,9	120.374,4	128.265,1	128.185,5	138.495,7
C Industri Pengolahan	1.186.706,1	1.339.289,3	1.487.956,3	1.684.855,9	1.839.106,3
D Pengadaan Listrik dan Gas	39.905,5	39.009,1	50.311,3	67.469,1	86.690,7
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	74.262,2	79.654,8	87.477,0	93.684,4	101.580,4
F Konstruksi	2.802.288,9	3.121.731,0	3.246.489,6	3.451.424,0	3.830.032,8
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.926.006,3	2.152.448,1	2.413.107,4	2.659.117,7	2.902.266,9
H Transportasi dan Pergudangan	5.610.455,2	6.913.400,6	8.831.238,2	10.263.821,5	11.883.251,2
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.186.658,8	8.807.667,9	10.815.279,8	11.787.944,9	12.994.615,9
J Informasi dan Komunikasi	1.833.380,1	1.940.828,4	2.135.232,1	2.348.385,5	2.559.833,9
K Jasa Keuangan dan Asuransi	753.082,4	896.695,4	1.001.518,7	1.100.990,6	1.224.988,2
L Real Estat	999.499,6	1.124.149,4	1.259.789,0	1.364.238,8	1.480.870,0
M,N Jasa Perusahaan	198.610,6	224.185,5	247.841,2	283.090,5	316.479,1
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.025.890,8	1.043.149,6	1.199.854,7	1.319.006,4	1.452.204,1
P Jasa Pendidikan	818.669,1	1.004.173,3	1.140.135,7	1.240.780,3	1.410.502,6
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	329.955,7	390.756,1	447.442,3	511.780,0	586.827,5
R,S,T,U Jasa lainnya	209.608,3	239.828,4	265.044,0	297.034,9	338.453,1
Produk Domestik Regional Bruto	27.200.747,5	31.790.031,6	37.273.280,8	41.384.280,9	46.147.882,9

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 1.2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha,
2012-2016 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.954.367,9	1.982.149,3	2.087.311,5	2.182.148,2	2.243.344,2
B Pertambangan dan Penggalian	98.015,9	105.140,1	106.351,6	102.076,4	104.234,3
C Industri Pengolahan	1.074.565,5	1.163.278,2	1.283.499,3	1.387.237,8	1.447.932,0
D Pengadaan Listrik dan Gas	51.323,0	55.373,5	59.447,2	60.098,4	65.577,7
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	74.588,2	78.636,8	85.523,5	88.569,4	93.194,1
F Konstruksi	2.478.052,5	2.623.076,0	2.705.925,4	2.817.432,2	3.009.188,4
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.749.222,3	1.905.693,4	2.073.020,0	2.238.226,3	2.359.245,7
H Transportasi dan Pergudangan	4.552.037,7	4.826.614,9	4.958.177,6	5.093.133,8	5.552.875,0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.117.806,9	6.631.284,5	7.132.961,5	7.640.246,9	8.142.314,5
J Informasi dan Komunikasi	1.824.268,4	1.927.366,1	2.092.928,0	2.276.899,0	2.481.239,4
K Jasa Keuangan dan Asuransi	653.915,5	737.528,2	819.727,5	890.634,6	957.430,1
L Real Estat	945.467,0	1.010.167,5	1.115.698,2	1.202.303,5	1.264.178,2
M,N Jasa Perusahaan	185.228,6	202.083,0	220.511,4	236.098,9	248.113,4
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	999.984,2	998.014,5	1.122.021,4	1.229.680,2	1.324.152,8
P Jasa Pendidikan	768.876,5	873.738,8	981.167,1	1.062.447,7	1.137.383,7
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	304.442,6	343.019,6	391.441,8	432.650,2	468.674,4
R,S,T,U Jasa lainnya	195.488,3	203.367,3	222.346,9	240.596,0	261.506,7
Produk Domestik Regional Bruto	24.027.651,2	25.666.531,6	27.458.060,1	29.180.479,4	31.160.584,6

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 2.1. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.72	7.40	6.75	6.72	6.50
B Pertambangan dan Penggalian	0.39	0.38	0.34	0.31	0.30
C Industri Pengolahan	4.36	4.21	3.99	4.07	3.99
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.15	0.12	0.13	0.16	0.19
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.27	0.25	0.23	0.23	0.22
F Konstruksi	10.30	9.82	8.71	8.34	8.30
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.08	6.77	6.47	6.43	6.29
H Transportasi dan Pergudangan	20.63	21.75	23.69	24.80	25.75
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26.42	27.71	29.02	28.48	28.16
J Informasi dan Komunikasi	6.74	6.11	5.73	5.67	5.55
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.77	2.82	2.69	2.66	2.65
L Real Estat	3.67	3.54	3.38	3.30	3.21
M,N Jasa Perusahaan	0.73	0.71	0.66	0.68	0.69
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.77	3.28	3.22	3.19	3.15
P Jasa Pendidikan	3.01	3.16	3.06	3.00	3.06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.21	1.23	1.20	1.24	1.27
R,S,T,U Jasa lainnya	0.77	0.75	0.71	0.72	0.73
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 2.2. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.13	7.72	7.60	7.48	7.20
B Pertambangan dan Penggalian	0.41	0.41	0.39	0.35	0.33
C Industri Pengolahan	4.47	4.53	4.67	4.75	4.65
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30
F Konstruksi	10.31	10.22	9.85	9.66	9.66
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.28	7.42	7.55	7.67	7.57
H Transportasi dan Pergudangan	18.94	18.81	18.06	17.45	17.82
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.46	25.84	25.98	26.18	26.13
J Informasi dan Komunikasi	7.59	7.51	7.62	7.80	7.96
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.72	2.87	2.99	3.05	3.07
L Real Estat	3.93	3.94	4.06	4.12	4.06
M,N Jasa Perusahaan	0.77	0.79	0.80	0.81	0.80
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.16	3.89	4.09	4.21	4.25
P Jasa Pendidikan	3.20	3.40	3.57	3.64	3.65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.27	1.34	1.43	1.48	1.50
R,S,T,U Jasa lainnya	0.81	0.79	0.81	0.82	0.84
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3.1. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	115.86	129.78	138.81	153.49	165.58
B Pertambangan dan Penggalian	137.63	156.96	167.25	167.14	180.58
C Industri Pengolahan	116.65	131.65	146.27	165.62	180.79
D Pengadaan Listrik dan Gas	93.91	91.80	118.40	158.78	204.02
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	102.91	110.38	121.22	129.83	140.77
F Konstruksi	143.79	160.18	166.58	177.10	196.52
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	123.01	137.47	154.12	169.83	185.36
H Transportasi dan Pergudangan	142.43	175.50	224.19	260.56	301.67
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	135.69	166.29	204.20	222.56	245.35
J Informasi dan Komunikasi	118.14	125.06	137.59	151.32	164.95
K Jasa Keuangan dan Asuransi	131.63	156.73	175.05	192.44	214.11
L Real Estat	117.29	131.92	147.84	160.09	173.78
M,N Jasa Perusahaan	112.82	127.35	140.79	160.81	179.78
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	130.16	132.35	152.23	167.35	184.25
P Jasa Pendidikan	118.28	145.08	164.73	179.27	203.79
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122.14	144.65	165.63	189.45	217.23
R,S,T,U Jasa lainnya	120.34	137.69	152.16	170.53	194.31
Produk Domestik Regional Bruto	130.47	152.48	178.78	198.50	221.35

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3.2. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107.81	109.34	115.14	120.37	123.75
B Pertambangan dan Penggalian	127.80	137.09	138.67	133.10	135.91
C Industri Pengolahan	105.63	114.35	126.17	136.37	142.33
D Pengadaan Listrik dan Gas	120.78	130.32	139.90	141.43	154.33
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103.36	108.97	118.52	122.74	129.15
F Konstruksi	127.15	134.59	138.84	144.57	154.41
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	111.72	121.71	132.40	142.95	150.68
H Transportasi dan Pergudangan	115.56	122.53	125.87	129.29	140.97
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115.51	125.20	134.67	144.25	153.73
J Informasi dan Komunikasi	117.55	124.19	134.86	146.72	159.88
K Jasa Keuangan dan Asuransi	114.30	128.91	143.28	155.67	167.35
L Real Estat	110.95	118.54	130.93	141.09	148.35
M,N Jasa Perusahaan	105.22	114.80	125.26	134.12	140.94
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	126.88	126.63	142.36	156.02	168.01
P Jasa Pendidikan	111.09	126.24	141.76	153.50	164.33
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112.70	126.98	144.90	160.16	173.49
R,S,T,U Jasa lainnya	112.23	116.75	127.65	138.13	150.13
Produk Domestik Regional Bruto	115.25	123.11	131.70	139.96	149.46

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 4.1. Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107.5	118.7	120.6	127.5	133.8
B Pertambangan dan Penggalian	107.7	114.5	120.6	125.6	132.9
C Industri Pengolahan	110.4	115.1	115.9	121.5	127.0
D Pengadaan Listrik dan Gas	77.8	70.4	84.6	112.3	132.2
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	99.6	101.3	102.3	105.8	109.0
F Konstruksi	113.1	119.0	120.0	122.5	127.3
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	110.1	112.9	116.4	118.8	123.0
H Transportasi dan Pergudangan	123.3	143.2	178.1	201.5	214.0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117.5	132.8	151.6	154.3	159.6
J Informasi dan Komunikasi	100.5	100.7	102.0	103.1	103.2
K Jasa Keuangan dan Asuransi	115.2	121.6	122.2	123.6	127.9
L Real Estat	105.7	111.3	112.9	113.5	117.1
M,N Jasa Perusahaan	107.2	110.9	112.4	119.9	127.6
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	102.6	104.5	106.9	107.3	109.7
P Jasa Pendidikan	106.5	114.9	116.2	116.8	124.0
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.4	113.9	114.3	118.3	125.2
R,S,T,U Jasa lainnya	107.2	117.9	119.2	123.5	129.4
Produk Domestik Regional Bruto	113.2	123.9	135.7	141.8	148.1

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 4.2. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB
Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.18	10.45	1.57	5.77	4.94
B Pertambangan dan Penggalan	3.32	6.32	5.34	4.12	5.81
C Industri Pengolahan	5.05	4.25	0.69	4.77	4.58
D Pengadaan Listrik dan Gas	-10.99	-9.40	20.14	32.65	17.75
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.10	1.74	0.98	3.41	3.05
F Konstruksi	7.27	5.24	0.81	2.10	3.90
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.52	2.58	3.06	2.06	3.55
H Transportasi dan Pergudangan	10.94	16.21	24.35	13.14	6.19
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.72	13.07	14.16	1.76	3.44
J Informasi dan Komunikasi	0.71	0.20	1.31	1.10	0.03
K Jasa Keuangan dan Asuransi	10.33	5.57	0.49	1.18	3.50
L Real Estat	2.54	5.27	1.47	0.49	3.24
M,N Jasa Perusahaan	6.35	3.46	1.31	6.68	6.38
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.46	1.88	2.31	0.31	2.24
P Jasa Pendidikan	6.42	7.94	1.11	0.50	6.19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.01	5.11	0.34	3.48	5.85
R,S,T,U Jasa lainnya	5.21	9.98	1.08	3.57	4.83
Produk Domestik Regional Bruto	7.50	9.41	9.60	4.48	4.42

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 5.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.87	12.02	6.95	10.58	7.88
B Pertambangan dan Penggalian	19.74	14.04	6.56	-0.06	8.04
C Industri Pengolahan	10.18	12.86	11.10	13.23	9.16
D Pengadaan Listrik dan Gas	-1.14	-2.25	28.97	34.10	28.49
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.40	7.26	9.82	7.10	8.43
F Konstruksi	28.14	11.40	4.00	6.31	10.97
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.73	11.76	12.11	10.19	9.14
H Transportasi dan Pergudangan	17.64	23.22	27.74	16.22	15.78
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.82	22.56	22.79	8.99	10.24
J Informasi dan Komunikasi	8.97	5.86	10.02	9.98	9.00
K Jasa Keuangan dan Asuransi	19.90	19.07	11.69	9.93	11.26
L Real Estat	9.18	12.47	12.07	8.29	8.55
M,N Jasa Perusahaan	8.62	12.88	10.55	14.22	11.79
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.59	1.68	15.02	9.93	10.10
P Jasa Pendidikan	6.80	22.66	13.54	8.83	13.68
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.41	18.43	14.51	14.38	14.66
R,S,T,U Jasa lainnya	10.47	14.42	10.51	12.07	13.94
Produk Domestik Regional Bruto	15.71	16.87	17.25	11.03	11.51

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 5.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.42	1.42	5.31	4.54	2.80
B Pertambangan dan Penggalian	15.89	7.27	1.15	-4.02	2.11
C Industri Pengolahan	4.89	8.26	10.33	8.08	4.38
D Pengadaan Listrik dan Gas	11.07	7.89	7.36	1.10	9.12
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.29	5.43	8.76	3.56	5.22
F Konstruksi	19.46	5.85	3.16	4.12	6.81
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.05	8.95	8.78	7.97	5.41
H Transportasi dan Pergudangan	6.04	6.03	2.73	2.72	9.03
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.14	8.39	7.57	7.11	6.57
J Informasi dan Komunikasi	8.20	5.65	8.59	8.79	8.97
K Jasa Keuangan dan Asuransi	8.68	12.79	11.15	8.65	7.50
L Real Estat	6.47	6.84	10.45	7.76	5.15
M,N Jasa Perusahaan	2.13	9.10	9.12	7.07	5.09
O Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.12	-0.20	12.43	9.60	7.68
P Jasa Pendidikan	0.36	13.64	12.30	8.28	7.05
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.10	12.67	14.12	10.53	8.33
R,S,T,U Jasa lainnya	5.00	4.03	9.33	8.21	8.69
Produk Domestik Regional Bruto	7.64	6.82	6.98	6.27	6.79

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BADUNG**
Jl. Raya Darmasaba, Ablansemal, Badung
Telp:(0361)8441616, Fax:(0361)8441717
Homepage:badungkab.bps.go.id
Email:bps5103@bps.go.id

ISSN : 2087 - 6866



9 772087 686002